



LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING:

Ellya Susilowati, M.Si., Ph.D

Versanudin Hekmatyar, S.KPm., M.Kesos

Oleh:

NOUR MALITA AZAHRA RAMADHANY

NRP. 20.03.034

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

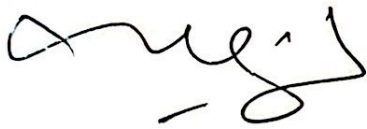
Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama Mahasiswa : Nour Malita Azahra Ramadhany

NRP : 2003034

Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan

Pembimbing:



Ellya Susilowati, M.Si, Ph.D



Versanudin Hekmatyar, S.KPm, M.Kesos

Mengetahui:

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,



Lina Favourita Setiaputri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah dilaksanakan selama 40 hari, dimulai pada tanggal 8 Februari 2023 hingga 15 April 2023.

Laporan ini berisi analisis dan rencana intervensi terhadap masalah yang terdapat dalam lima profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, yaitu Profil Analisis Jaminan Sosial, Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analisis Pemberdayaan Sosial, Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analisis Penanggulangan Bencana. Praktikan menyadari bahwa laporan ini dapat selesai berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini praktikan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Ellya Susilowati, M.Si, Ph.D. dan Versanudin Hekmatyar, S.KPm, M.Kesos., selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada praktikan.
3. Lina Favourita Setiaputri, Ph.D., selaku Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
4. Dra. Atirista Nainggolan, MP., selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
5. Agus Guswara selaku Pelaksana Tugas Lurah (PLT Lurah), Dede Nila selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, serta staf Kantor Kelurahan Kebon Jayanti.
6. Seluruh masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti.
7. Teman-teman kelompok 2 Praktikum Laboratorium Kelurahan Kebon Jayanti.
8. Pihak-pihak yang telah membantu praktikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, praktikan menerima saran dan masukan membangun agar nantinya ada perbaikan dalam penyusunan laporan praktikum selanjutnya. Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 11 Februari 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	2
1.3 Manfaat Praktikum.....	2
1.4 Waktu dan Lokasi Praktikum.....	3
1.5 Proses Praktikum	4
1.6 Sistematika Laporan.....	8
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	9
2.1 Profil Analis Jaminan Sosial.....	9
2.1.1 Gambaran Umum Masalah.....	9
2.1.2 Tinjauan Konsep.....	10
2.1.3 Asesmen.....	13
2.1.4 Rencana Intervensi.....	20
2.2 Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	28
2.2.1 Gambaran Umum Masalah.....	28
2.2.2 Tinjauan Konsep.....	29
2.2.3 Asesmen.....	32
2.2.4 Rencana Intervensi.....	38
2.3 Profil Analis Pemberdayaan Sosial.....	45
2.3.1 Gambaran Umum Masalah.....	45
2.3.2 Tinjauan Konsep.....	46
2.3.3 Asesmen.....	48
2.3.4 Rencana Intervensi.....	55
2.4 Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial.....	62
2.4.1 Gambaran Umum Masalah.....	62
2.4.2 Tinjauan Konsep.....	63
2.4.3 Asesmen.....	67
2.4.4 Rencana Intervensi.....	73
2.5 Profil Analis Penanggulangan Bencana.....	81
2.5.1 Gambaran Umum Masalah.....	81
2.5.2 Tinjauan Konsep.....	82
2.5.3 Asesmen.....	86
2.5.4 Rencana Intervensi.....	93
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	101
3.1 Kesimpulan.....	99

3.2 Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sistem partisipan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).....	22
Tabel 1.2	Rencana anggaran kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).....	23
Tabel 1.3	Daftar alat dan bahan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).....	24
Tabel 1.4	Analisis SWOT sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).....	25
Tabel 1.5	Jadwal kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).....	27
Tabel 2.1	Sistem partisipan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga.....	39
Tabel 2.2	Rencana anggaran kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga.....	41
Tabel 2.3	Daftar alat dan bahan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga.....	42
Tabel 2.4	Analisis SWOT kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga.....	43
Tabel 2.5	Jadwal kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga.....	44
Tabel 3.1	Sistem partisipan kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).....	56
Tabel 3.2	Rencana anggaran kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).....	57
Tabel 3.3	Daftar alat dan bahan kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).....	59
Tabel 3.4	Analisis SWOT kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).....	59
Tabel 3.5	Jadwal kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).....	59
Tabel 4.1	Sistem partisipan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah.....	75
Tabel 4.2	Rencana anggaran kegiatan penyuluhan terkait bank sampah.....	76

Tabel 4.3	Daftar alat dan bahan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah.....	77
Tabel 4.4	Analisis SWOT kegiatan penyuluhan terkait bank sampah.....	78
Tabel 4.5	Jadwal kegiatan penyuluhan terkait bank sampah.....	80
Tabel 5.1	Sistem partisipan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.....	94
Tabel 5.2	Rencana anggaran kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.....	96
Tabel 5.3	Daftar alat dan bahan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.....	97
Tabel 5.4	Analisis SWOT kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.....	98
Tabel 5.5	Jadwal kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis pohon masalah analisis jaminan sosial.....	16
Gambar 2.1	Analisis pohon masalah analisis sumber dana bantuan sosial.....	35
Gambar 3.1	Analisis pohon masalah analisis pemberdayaan sosial.....	51
Gambar 4.1	Analisis pohon masalah analisis penataan lingkungan sosial.....	70
Gambar 5.1	Analisis pohon masalah analisis penanggulangan bencana.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Resume Pembekalan.....	108
Dokumentasi Bimbingan/Supervisi Praktikum Laboratorium.....	121
Dokumentasi Kegiatan Praktikum Laboratorium.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

Lokasi praktikum laboratorium tahun 2023 ini dilaksanakan di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dimana, pemerintah Kelurahan Kebon Jayanti sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Bandung yang akan menjadi salah satu penopang dan penyangga dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bandung. Sebagai salah satu penunjang dan penopang peran Kota Bandung sebagai Bandung Juara, maka seluruh *stakeholder* dan aparat Kelurahan Kebon Jayanti dapat bekerja sama secara harmonis, saling mengisi dan bahu membahu mewujudkan visi Kota sebagai Bandung juara dengan bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Berdasarkan fakta di lapangan, Kelurahan Kebon Jayanti ini masih terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu, pada praktikum laboratorium ini

praktikan melakukan asesmen secara lebih lanjut hingga menentukan sebuah rencana intervensi. Praktikan mengangkat beberapa isu permasalahan diantaranya pada profil analis jaminan sosial mengangkat permasalahan terkait peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) atau mandiri tetapi telat melakukan pembayaran iuran sehingga menyebabkan tunggakan tagihan, profil analis sumber dana bantuan sosial mengangkat permasalahan terkait pengelolaan iuran dana santunan kesehatan yang belum optimal, profil analis pemberdayaan sosial mengangkat permasalahan terkait pengangguran, profil analis penataan lingkungan mengangkat permasalahan pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal, dan profil analisis penanggulangan bencana mengangkat permasalahan terkait bencana banjir akibat luapan air sungai di Kelurahan Kebon Jayanti.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
4. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - a. Pendekatan Awal
 - b. Asesmen
 - c. Perencanaan Intervensi

1.3 Manfaat Praktikum

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- 1) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama

dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- 2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 3) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 5) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 6) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
 - a. Pendekatan awal
 - b. Asesmen
 - c. Rencana Intervensi

1.3.2 Bagi Lembaga

- 1) Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- 2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

1.4 Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum di desa atau kelurahan tempat tinggal masing-masing praktikan. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
 - a. Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
 - b. Pelepasan Praktikan : 8 Februari 2023
2. Lapangan (*Indoor*) : 8 Februari – 15 April 2023
3. Pasca Lapangan :
 - a. Bimbingan penulisan laporan : 16 – 26 April 2023
 - b. Pendaftaran ujian : 27 – 29 April 2023
 - c. Ujian Lisan Praktikum : 2 – 3 Mei 2023
 - d. Perbaikan dan penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

1.5 Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1.5.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap persiapan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti:

1) Pembekalan umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian dan penyampaian materi tentang 5 (lima) profil perlindungan dan pemberdayaan sosial yaitu jaminan sosial, sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial, penataan lingkungan sosial, dan penanggulangan bencana oleh beberapa narasumber yang terdiri dari:

- a. Koordinator Jaminan Sosial Bappenas RI bernama Gayatri Waditra Nirwesti, ME.
- b. CSR Manager PT. AAPC Indonesia bernama Tonton Heriyanto.
- c. Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kabupaten Cianjur bernama Samsul Maarif.
- d. Deputi 1 CEO, *Islamic Relief* Indonesia bernama Ade Reno, AKS, MSW.
- e. Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta bernama Mohd Robi Amri.

2) Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum

Bimbingan pertama dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023, dalam bimbingan pertama ini dilaksanakan perkenalan praktikan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ellya Susilowati, M.Si, Ph.D. Setelah dilakukan perkenalan praktikan dan dosen pembimbing membahas isi dari pedoman praktikum laboratorium dan matriks rencana kerja praktikum untuk kelompok. Dalam pertemuan ini praktikan juga diberikan tugas sebagai bahan untuk *mereview* materi pembekalan umum, mendalami teori dan keterampilan yang akan diterapkan, mengenal program-program dalam Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana, dan mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang berkaitan dengan ke-5 (kelima) profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Bimbingan kedua dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023 dalam bimbingan kedua ini dilaksanakan *review* materi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ellya Susilowati, M.Si, Ph.D., dan Bapak Versanudin Hekmatyar, S.KPm, M.Kesos. Dalam bimbingan kedua ini, praktikan menyampaikan tugas yang telah diberikan sebelumnya pada saat bimbingan pertama mengenai teori umum dari ke-5 (kelima) profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial, dan juga teori dan konsep praktik pekerjaan sosial. Selain itu, dosen pembimbing juga memberikan arahan yang harus praktikan lakukan saat turun ke lapangan.

3) Serah terima praktikan kepada Kelurahan Kebon Jayanti

Serah terima praktikan dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung yang dilakukan oleh dosen pembimbing praktikum kelompok 2 yaitu Ibu Ellya Susilowati, M.Si, Ph.D., dan Bapak Versanudin Hekmatyar, S.KPm, M.Kesos kepada perwakilan dari Kantor Kelurahan Kebon Jayanti yaitu Ibu Yuniarti Putri selaku staff kesejahteraan sosial dikarenakan lurah Kebon Jayanti telah memasuki masa pensiunnya.

1.5.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1.5.2.1 Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE., selaku Perencana Ahli Muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2023, dengan materi:
 - a. Kebijakan dan struktur jaminan sosial;
 - b. Tantangan program jaminan sosial di Indonesia khususnya pekerja informal di Indonesia;
 - c. Potensi kontribusi lulusan jaminan sosial; dan
 - d. Kebijakan dan struktur jaminan sosial.
- 2) Praktik Analisis Jaminan Sosial yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari - 18 Februari 2023, meliputi:
 - a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan jaminan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti yang dilaksanakan pada tanggal 8 - 12 Februari 2023.
 - b. Melakukan Asesmen dengan menggunakan data sekunder yang dilaksanakan pada tanggal 13 - 16 Februari 2023.

Pada tahap ini dilaksanakan pembimbingan oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 Februari 2023 yang membahas tentang *progress* penulisan laporan praktik analisis jaminan sosial mulai dari asesmen hingga rencana intervensi.
 - c. Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dipilih oleh praktikan yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 19 Februari 2023.
 - d. Menyusun laporan praktik analisis jaminan sosial yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Februari 2023.

1.5.2.2 Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Tonton Heriyanto, selaku *CSR Manager* PT. AAPC Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023, dengan materi:
 - a. Pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - b. Permasalahan yang dialami oleh organisasi nirlaba;
 - c. Kemitraan;
 - d. Masalah dalam pengelolaan dana bantuan sosial dengan mitra;
 - e. Manajemen sumber dana bantuan sosial;
 - f. Komponen dalam membangun jaringan; dan
 - g. Tips penggalangan dana bantuan sosial.
- 2) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari - 4 Maret 2023, meliputi:
 - a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan sumber dana bantuan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti yang dilaksanakan pada tanggal 23 - 26 Februari 2023.
 - b. Melakukan Asesmen dengan menggunakan data sekunder yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari - 2 Maret 2023.
 - c. Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dipilih oleh praktikan yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 5 Maret 2023.
 - d. Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial yang dilaksanakan pada tanggal 6 - 7 Februari 2023.

1.5.2.3 Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Samsul Maarif, selaku *Project Manager* Yayasan Usaha Mulia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023, dengan materi:
 - a. Inti pemberdayaan;
 - b. Pendekatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Aktor-aktor dalam program pemberdayaan;
 - d. Tahapan proses pemberdayaan;
 - e. Bentuk Pemberdayaan; dan
 - f. Permasalahan dan solusi dalam pemberdayaan.
- 2) Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan mulai tanggal 8 - 18 Maret 2023, meliputi:
 - a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti yang dilaksanakan pada tanggal 9 - 12 Maret 2023.
 - b. Melakukan Asesmen dengan menggunakan data sekunder yang dilaksanakan pada tanggal 13 - 16 Maret 2023.

- c. Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dipilih oleh praktikan yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 19 Maret 2023.
- d. Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Maret 2023.

1.5.2.4 Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh Ade Reno Sudiarno, AKS, MSW, selaku *Deputy* 1 CEO, Islamic Relief Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023, dengan materi:
 - a. Gambaran umum penataan lingkungan sosial;
 - b. Masalah sosial-ekonomi-lingkungan;
 - c. Tahapan kerja bidang penataan lingkungan sosial;
 - d. Kompetensi yang dibutuhkan untuk praktik penataan lingkungan sosial;
 - e. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam melakukan pendataan lingkungan sosial;
 - f. Peluang kerja bidang penataan lingkungan sosial.
- 2) Praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret - 1 April 2023, meliputi:
 - a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan penataan lingkungan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti yang dilaksanakan pada tanggal 23 - 26 Maret 2023.
 - b. Melakukan Asesmen dengan menggunakan data sekunder yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 30 Maret 2023.
 - c. Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dipilih oleh praktikan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret - 2 April 2023.
 - d. Menyusun laporan praktik analisis penataan lingkungan sosial yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 April 2023.

1.5.2.5 Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh Mohd Robi Amri, selaku Perencana Ahli Madya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023, dengan materi:
 - a. Konsepsi dan perspektif bencana;
 - b. Siklus bencana;
 - c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. *Stakeholder* penanggulangan bencana;
 - e. Tantangan umum dalam penanggulangan bencana;
 - f. Waktu dan tempat terbaik dalam berperan dalam penanggulangan bencana.

- 2) Praktik Analisis Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan mulai tanggal 5 - 15 April 2023, meliputi:
 - a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kelurahan Kebon Jayanti yang dilaksanakan pada tanggal 6 - 9 April 2023.
 - b. Melakukan Asesmen dengan menggunakan data sekunder yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 13 April 2023.
 - c. Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dipilih oleh praktikan yang dilaksanakan pada tanggal 14 -16 April 2023.
 - d. Menyusun laporan praktik analisis penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 April 2023.

1.5.3 Tahap Pengakhiran

1. Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
Pada tanggal 14 April 2023 dilaksanakan pembimbingan dengan kegiatan bimbingan penulisan laporan akhir sekaligus menjadi bimbingan terakhir.
2. Ujian Lisan Praktikum
3. Perbaikan dan penyerahan laporan

1.5 Sistematika Laporan

BAB I : PENDAHULUAN, memuat latar belakang; tujuan dan manfaat praktikum; proses praktikum; dan sistematika laporan.

BAB II : PRAKTIKUM LABORATORIUM, memuat gambaran umum masalah; tinjauan konsep/teori; asesmen; dan rencana intervensi setiap profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial.

BAB III : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial

2.1.1 Gambaran Umum Masalah

Kehadiran negara untuk melindungi para pekerja dituangkan dalam beberapa peraturan yang ada seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun beberapa peraturan terkait jaminan sosial lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta sederet aturan pendukung lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya. Setiap pekerja dengan apapun jenis pekerjaan dan statusnya pasti membutuhkan jaminan sosial yang memadai untuk kehidupannya. Jika dilihat berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang, wiraswasta, pekerja keluarga, dan buruh. Dimana, pekerjaan tersebut termasuk ke dalam kategori pekerja sektor informal. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa di Kelurahan Kebon Jayanti pekerja sektor informalnya lebih banyak dibandingkan dengan pekerja sektor formal. Akan tetapi, jumlah kepesertaan pekerja sektor informal untuk jaminan sosial kesehatan di Kelurahan Kebon Jayanti masih terbilang sangat sedikit sekali, padahal faktanya masih terdapat banyak keluarga yang berada pada garis kemiskinan dan perlu mendapatkan bantuan berupa fasilitas kesehatan.

Sedikitnya pekerja informal yang mengikuti jaminan sosial, akan semakin mendekatkan mereka pada garis kemiskinan. Sejak dahulu masalah kemiskinan tidak habis untuk dibahas dan sampai sekarang masalah kemiskinan juga belum dapat diatasi. Sebab penduduk miskin lebih rentan terhadap penurunan dan bahkan kehilangan pendapatan yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti hilangnya pekerjaan, masalah kesehatan, seperti sakit atau kecelakaan maupun karena bangkrutnya usaha. Pada akhirnya, beberapa masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti yang belum menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penerima Bantuan Iuran (PBI), beberapa dari mereka tertarik untuk mendaftarkan dirinya secara mandiri. Mereka berbondong-bondong mendaftar pada saat gebyar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) atau mandiri yang sedang dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika jatuh tempo waktu pembayaran iuran setiap bulannya mereka tidak mampu membayar dengan alasan tidak berpenghasilan dan mengakibatkan mereka memiliki tunggakan dari jumlah yang sedikit hingga jumlah banyak. Dari situlah banyak masyarakat yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) atau mandiri ingin beralih atau berpindah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penerima

Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah maupun ke program khusus Kota Bandung yaitu *Universal Health Coverage* (UHC).

Oleh karena itu, pentingnya jaminan sosial bagi setiap pekerja merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, program yang ditawarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pun dapat menjadi tumpuan bagi para pekerja yang telah menjadi peserta atau anggota. Namun, hingga saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan Non-PBI masih belum maksimal dikarenakan kendala di beberapa hal, mulai dari keterbatasan pengetahuan, iuran tiap bulan, hingga tunggakan keterlambatan, dan lain sebagainya.

2.1.2 Tinjauan Konsep

a. Konsep Dasar Jaminan Sosial

Jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004). Sedangkan, menurut *International Labour Organization* (ILO) jaminan sosial (*social security*) yaitu pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya penghasilan (Husni, 2003:53).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) prinsip dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat; dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Adapun jenis-jenis dari program jaminan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

4. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

5. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan keterangan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Setiap orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin,

iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditanggung pemerintah melalui Program Bantuan Iuran.

Identitas peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), yang telah membayar iuran meliputi:

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non-PBI) atau mandiri, terdiri dari:
 - a. Pekerja Penerima Upah (PPU) termasuk anggota keluarganya (istri/suami, anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dan belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun bagi yang masih melanjutkan pendidikan formal) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dan dapat mengikutsertakan keluarga tambahan yang meliputi anak ke 4 (empat) dan seterusnya, orang tua kandung dan mertua;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau perorangan;
 - c. Bukan Pekerja (BP) : penerima pensiun penyelenggara negara, veteran, perintis kemerdekaan termasuk anggota keluarganya (istri/suami, anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, penerima pensiun bukan penyelenggara negara.

Mekanisme besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020, yaitu:

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Segmen ini adalah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Iuran BPJS Kesehatan PBI-JK sebesar Rp 42.000 perorang/perbulan dibayarkan oleh pemerintah pusat dengan kontribusi pemerintah daerah serta oleh pemerintah daerah bagi penduduk yang didaftarkan pemda.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) atau mandiri:

- a. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Segmen ini adalah peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dan Bukan Penyelenggara Negara serta Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara. Iuran BPJS Kesehatannya adalah sebesar 5% dari upah dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja.

Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) Bukan Penyelenggara Negara (swasta), upah adalah gaji pokok ditambah tunjangan, dengan batas paling rendah sebesar upah minimum kabupaten/kota/provinsi. Ketentuan perhitungan batas paling tinggi gaji atau upah perbulan yaitu sebesar Rp12 juta.

- b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau perorangan dan Bukan Pekerja (BP)

Segmen ini adalah segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dibayarkan oleh yang bersangkutan atau pihak lain atas nama peserta, dengan besaran iuran:

- 1) Iuran BPJS Kesehatan kelas III sebesar Rp35.000/perorang/perbulan. Iuran BPJS Kesehatan kelas III sebenarnya Rp 42.000 namun sebesar Rp 7.000 per orang per bulan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran bagi PBPU dan BP.
- 2) Iuran BPJS Kesehatan kelas II sebesar Rp100.000/perorang/perbulan.
- 3) Iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150.000/perorang/perbulan.

Bagi peserta yang mengalami telat bayar atau menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak dikenakan denda sama sekali. Namun, merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, status kepesertaan akan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Hal ini berlaku baik untuk peserta mandiri maupun peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja. Pasal 22 Ayat (5) menyebutkan jika “*Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali peserta wajib membayar denda kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya*”. Itu artinya, peserta tidak akan dikenai denda, asalkan dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali peserta tidak melakukan rawat inap. Namun, apabila sejak waktu 45 hari status kepesertaan diaktifkan dan melakukan rawat inap, peserta wajib membayar denda lima persen dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak. Adapun denda iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sendiri memiliki ketentuan yakni:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan;
2. Besaran denda paling tinggi Rp 30 juta.

2.1.3 Asesmen

2.1.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi sumber adalah:

- 1) *Home Visit*

Home visit (kunjungan rumah atau tempat) merupakan salah satu teknik yang digunakan praktikan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah dari Kader BPJS Kesehatan dan beberapa warga di Kelurahan Kebon Jayanti. Hal itu dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terselesaikannya permasalahan terkait jaminan sosial melalui kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang

permasalahan apa saja yang ada disana, sehingga *home visit* yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan jaminan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti mengenai BPJS Kesehatan dan juga praktikan ingin mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.1.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber daya terkait isu masalah Analisis Jaminan Sosial yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Mengidentifikasi permasalahan terkait jaminan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti, apa yang membuat mereka tidak terdaftar jaminan sosial kesehatan, apa penyebab dan dampak jika mereka tidak terdaftar jaminan sosial kesehatan, apa kebutuhan dan potensi sumber daya mereka. Berdasarkan informasi dari pihak kader BPJS Kesehatan bernama Ibu Wiwik mengatakan bahwa banyak dari masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti yang belum mengikuti kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan juga banyak peserta dari BPJS Kesehatan Non-PBI yang memiliki tunggakan tagihan sebanyak 600 orang peserta. Maka dari itu, saya sebagai praktikan memperoleh informasi lebih lanjut dengan menemui para peserta yang ada pada data penunggak iuran di Kelurahan Kebon Jayanti untuk mengetahui alasan, penyebab, dan dampak yang dialaminya hingga tidak dapat membayarkan besaran iuran yang telah ditentukan. Asesmen untuk menggali informasi dilakukan pada tanggal 13 - 16 Februari 2023.

a. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah terkait dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat adalah:

1. Masih minimnya penyelenggaraan jaminan kesehatan

Pelayanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan di Kelurahan Kebon Jayanti masih belum jelas. Disini, masih banyak yang tidak mementingkan legalitas. Ketika muncul sebuah permasalahan seperti keadaan darurat bisa berupa sakit ataupun kecelakaan, masyarakat baru sadar mengapa tidak terdaftar pada Kartu Indonesia Sehat (KIS). Akhirnya, mereka akan meminta bantuan pengurus untuk mendaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal itu akan terjadi secara terus-menerus, masyarakat pasti akan selalu

merepotkan dan menghubungi pengurus lagi dan lagi. Masyarakat biasanya tidak mau tahu untuk tahapan-tahapannya, mereka hanya ingin tahu beres dan tinggal pakai saja. Padahal, untuk melakukan pendaftaran harus melalui aplikasi dan masyarakat kebanyakan *handphonenya* belum *diupdate* atau masyarakat belum melek teknologi.

2. Tidak semua warga mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan kuota yang tersedia terbatas

Berdasarkan data yang ditemukan, masih terdapat cukup banyak masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Kebon Jayanti yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kuota yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena juga harus melakukan penyesuaian dengan kekuatan keuangan daerah yang ada. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih kurang untuk ikut menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Padahal, masih banyak masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan tersebut apalagi dikarenakan imbas dari sesudah pandemi COVID-19 yang kebanyakan dari mereka kehilangan penghasilan.

3. Terdapat pembayaran iuran jaminan kesehatan yang terlambat dan banyak tunggakannya

Di Kelurahan Kebon Jayanti mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang ataupun wiraswasta dikarenakan lokasi Pasar Kiaracandong yang juga terletak di satu kelurahan. Para pekerja tersebut ada yang termasuk sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)/mandiri. Jumlah masyarakat yang mengikuti jaminan kesehatan antara peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) pun tidak jauh berbeda. Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penerima Bantuan Iuran (PBI) iurannya sudah ditanggung oleh pemerintah. Namun, untuk pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) atau mandiri terdapat kendala.

Berdasarkan data yang telah didapatkan di lapangan, terdapat sebanyak 600 orang peserta yang terlambat membayar iuran setiap bulannya dan akhirnya tunggakannya sampai banyak. Hal itu terjadi dikarenakan kebanyakan masyarakat yang tadinya memiliki usaha namun setelah terjadinya pandemi COVID-19 usahanya menjadi bangkrut dan mereka tidak bisa membayar iuran yang telah ditetapkan setiap bulannya. Selain itu, kesadaran masyarakatnya juga masih kurang terhadap pentingnya jaminan kesehatan, seperti sering mengabaikan iuran setiap bulannya karena mereka

merasa tidak memakai jaminan kesehatan tersebut. Namun, mereka akan tersadar pentingnya jaminan kesehatan ketika sudah dalam keadaan darurat seperti sakit ataupun kecelakaan.

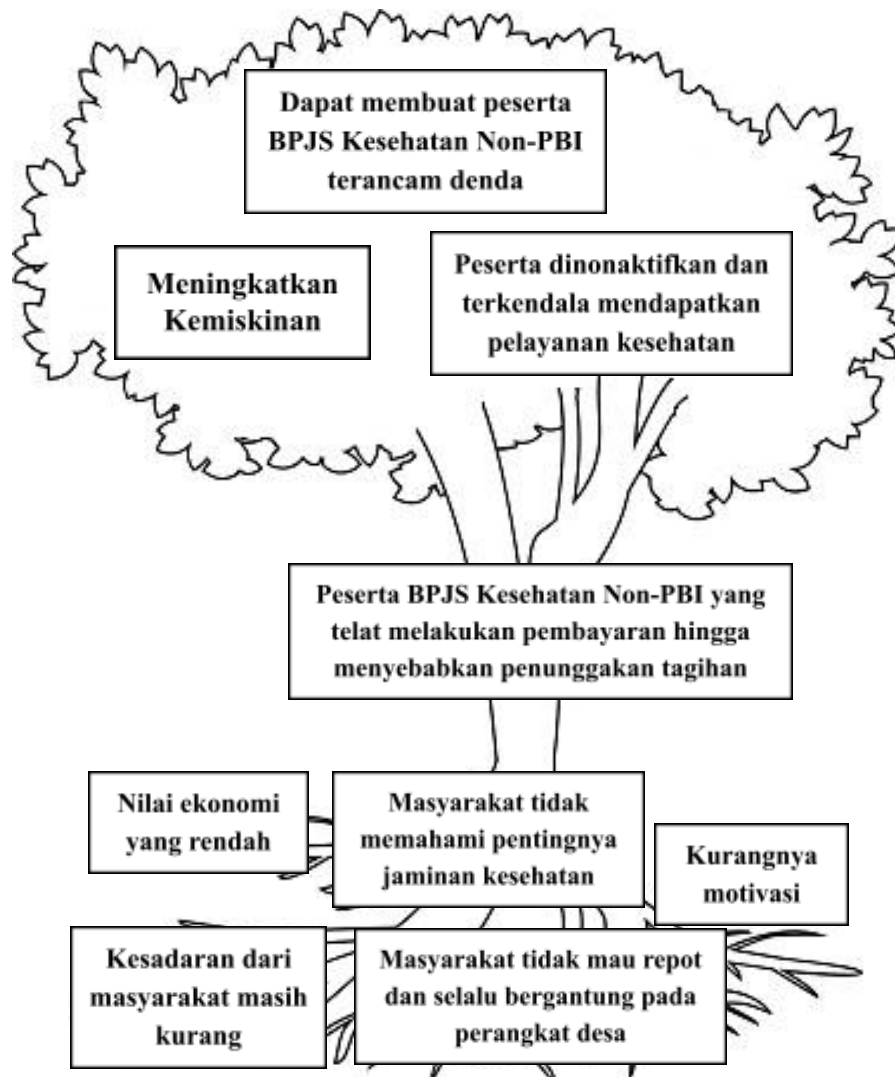
1) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dituliskan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan yaitu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) atau mandiri tetapi telat melakukan pembayaran iuran sehingga menyebabkan tunggakan tagihan.

2) Analisis Pohon Masalah

Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) atau mandiri tetapi telat melakukan pembayaran iuran sehingga menyebabkan tunggakan tagihan.

Gambar 1.1 Analisis pohon masalah analisis jaminan sosial



3) Penyebab Masalah

Penyebab dari permasalahan jaminan kesehatan di Kelurahan Kebon Jayanti disebabkan oleh:

a. Nilai ekonomi yang rendah

Pekerjaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang sehingga memperoleh penghasilan. Jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan juga. Sebagian peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mandiri yang tidak teratur dalam membayar iuran BPJS yaitu para pekerja yang memiliki nilai ekonomi yang rendah dan yang masuk dalam kategori kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Hasan, 2020). Mereka dengan nilai ekonomi yang rendah lebih mengutamakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya makan, biaya pendidikan, dan lainnya, sedangkan untuk biaya kesehatan belum menjadi prioritas karena mereka masih dalam keadaan sehat.

b. Masyarakat tidak memahami pentingnya jaminan kesehatan

Di kehidupan sehari-hari, kebanyakan masyarakat tidak menghiraukan keberadaan jaminan kesehatan. Namun, disaat mereka sedang tertimpa musibah atau berada dalam keadaan darurat seperti misalnya sakit atau kecelakaan, maka mereka baru akan ingat bahwa jaminan kesehatan sangatlah dibutuhkan untuk membantu pengobatan. Seperti pepatah mengatakan “sedia payung sebelum hujan”, disini seharusnya masyarakat mempersiapkan jaminan kesehatan sebelum terkena musibah atau dalam keadaan darurat.

c. Kesadaran dari masyarakat masih kurang

Terdapat hubungan antara nilai ekonomi dan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan peserta melakukan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dimana, semakin tinggi pendapatan seseorang maka kesadaran terhadap pembayaran iuran akan tinggi pula. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti yang masih telat membayar iuran dan tagihannya menumpuk.

d. Kurangnya motivasi pada masyarakat

Nurjannah, dkk (2021) menyatakan tidak selamanya seseorang memiliki motivasi yang tinggi dalam membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, motivasi negatif pun dapat timbul karena adanya alasan tertentu seperti : 1). Kurangnya pengetahuan mengenai peraturan; dan 2) Seseorang yang benar-benar tidak mampu masih diharuskan membayar iuran dengan pendapatan yang rendah, padahal mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua alasan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai motivasi untuk membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

e. Masyarakat tidak mau repot dan selalu bergantung pada perangkat desa

Dikarenakan sebab kurangnya motivasi pada masyarakat, mereka yang belum terdaftar sebagai kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan (BPJS Kesehatan) ataupun yang tidak membayar iuran bulanan, biasanya ketika mereka tertimpa musibah atau berada dalam keadaan darurat pasti akan datang menghubungi ke perangkat desa untuk meminta pertolongan. Padahal hal tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri yang dulunya selalu mengabaikan pentingnya jaminan kesehatan. Ketika mereka sedang membutuhkan jaminan kesehatan tersebut pasti yang disasar adalah perangkat desa lagi dan lagi.

4) Dampak Masalah

Permasalahan jaminan kesehatan yang terjadi di Kelurahan Kebon Jayanti dapat menimbulkan banyak dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan, baik pada Negara, penyelenggara jaminan kesehatan, dan juga peserta dari jaminan kesehatan, diantaranya seperti berikut:

a. Meningkatkan kemiskinan

Dengan adanya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI), masyarakat diharuskan untuk menambah pengeluaran dalam membayar jaminan kesehatan. Apalagi jika masyarakat memiliki tagihan tunggakan yang cukup banyak. Dari situlah banyak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) yang ingin pindah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau *Universal Health Coverage* (UHC). Hal itu membuat peserta yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) semakin meningkat yang secara tidak langsung juga menjadi bukti meningkatnya kemiskinan karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya diperuntukkan bagi masyarakat dalam kategori fakir miskin.

b. Dapat membuat peserta BPJS Non-PBI terancam denda

Ketentuan mengenai denda membayar iuran tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Mengutip Peraturan Presiden (Perpres) tersebut denda tidak akan berlaku bagi peserta yang belum pernah menerima layanan rawat. Denda hanya berlaku bagi peserta yang saat diberhentikan kepesertaannya secara sementara, sempat menerima layanan rawat inap, dan dalam 45 hari aktif kembali atau setelah membayar iuran, kepesertaannya aktif kembali. Denda akan diberikan apabila peserta tersebut telah menunggak hingga 12 bulan. Setelah itu, denda akan diakumulasi dan dikenakan ke peserta. Jika peserta tidak membayar iuran tepat waktu setiap bulannya, maka akan dikenakan denda hingga Rp30 juta atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit yang diderita kepada peserta yang menunggak bayar iuran.

c. Peserta yang telat membayar iuran akan di nonaktifkan dan menjadi terkendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Dalam hal ini, peserta yang telat membayar akan dinonaktifkan sejak 1 (satu) bulan berikutnya. Artinya, jika kartu telah nonaktif, maka peserta tidak dapat menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)nya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan saat berobat. Namun, kepesertaan dapat diaktifkan kembali jika peserta membayar iuran tertunggak dan iuran berjalan, kemudian peserta bisa kembali menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)nya lagi.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penyelesaian permasalahan tersebut adalah sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian masalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) atau mandiri tetapi telat melakukan pembayaran iuran sehingga menyebabkan tunggakan tagihan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Sumber Formal:

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang memiliki wewenang untuk memberikan jaminan sosial berbentuk kesehatan. Aspek tersebut merupakan hal penting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. BPJS Kesehatan memiliki tugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari Pemerintah, dan mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan pesertanya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan dapat dijadikan potensi dan sumber dalam pelaksanaan program yang akan dilakukan.

b. Kelurahan Kebon Jayanti

Dalam hal ini, peran dari Kelurahan Kebon Jayanti dapat mempengaruhi keberlangsungan partisipasi masyarakatnya dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Aparat kelurahan dapat berperan sebagai pengawas dan pemberi pemahaman serta motivasi dalam program kegiatan yang akan dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti khususnya yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

2. Sistem Sumber Informal:

a. Kader Jaminan Kesehatan (JKN)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) senantiasa melakukan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan-Kartu

Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan penagihan secara langsung kepada peserta yang saat ini masih ada tunggakan pembayaran iuran. Penagihan langsung ini dilakukan oleh seorang yang tangguh tidak patah semangat dan disebut juga dengan Kader Jaminan Kesehatan (JKN). Kader Jaminan Kesehatan (JKN) merupakan wujud partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dan turut membantu program pemerintah dalam bentuk pemberian sosialisasi, edukasi, pendaftaran peserta maupun pengingat dan pengumpul iuran. Selain itu, Kader Jaminan Kesehatan (JKN) juga dapat dijadikan peserta sebagai tempat untuk menyampaikan pengaduan tentang Program JKN-KIS. Para kader tersebut merupakan warga yang berasal dari sekitar lingkungan sekitar, yang direkrut langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Sistem Sumber Kemasyarakatan:

a. Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Kelurahan Kebon Jayanti, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) melakukan kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang besar dan memiliki kader yang luas. Organisasi tersebut memiliki kader-kader hingga tingkat bawah yang bisa memberi edukasi tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Untuk itu, dengan keberadaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama dan berkolaborasi yang diharapkan dapat menggugah masyarakat agar termotivasi untuk selalu dinamis serta mau mengubah keadaan yang lebih maju lagi.

2.1.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sudah memiliki sebuah program untuk mengatasi para peserta penunggak iuran. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menghadirkan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Program ini ditujukan bagi peserta pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) diharapkan bisa membantu meringankan beban peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memiliki tunggakan dengan usia tunggakan mulai dari 4 sampai dengan 24 bulan untuk dapat dibayarkan secara bertahap melalui mekanisme cicilan. Status peserta baru akan aktif ketika seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalannya telah lunas.

Namun, pada pelaksanaannya di Kelurahan Kebon Jayanti masih dirasa belum maksimal, dikarenakan berdasarkan data yang telah ditemukan, masih terdapat sebanyak 600 orang peserta yang mengabaikan iuran dan tagihannya disebabkan karena keterbatasan ekonomi ataupun mereka merasa belum mendesak menggunakan jaminan kesehatan tersebut. Otomatis, belum banyak peserta yang sadar dan berpartisipasi pada Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) yang dirancang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Berdasarkan fenomena di atas, praktikan membentuk penyelenggaraan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dilaksanakan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya memiliki jaminan kesehatan yang aktif dan bagaimana pelaksanaan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) supaya peserta menunggak dapat membayarkan tagihannya

2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) adalah:

- a. Peserta penunggak iuran BPJS Kesehatan Non-PBI melunasi tagihannya secara bertahap;
- b. Peserta penunggak iuran BPJS Kesehatan Non-PBI merasakan keringanan dari beban banyaknya tagihan akibat tunggakan pembayaran;
- c. Peserta penunggak iuran BPJS Kesehatan Non-PBI memperoleh manfaat perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya kembali.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dilaksanakan dalam bentuk pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada peserta penunggak iuran mengenai:

1. Wawasan terkait pentingnya jaminan kesehatan;
2. Ketentuan dari Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB);
3. Proses pelaksanaan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam penyelenggaraan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Sistem

partisipan ini terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam penyelenggaraan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), telah ditentukan sistem partisipan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Sistem partisipan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB)

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	a. Praktikan b. Kader BPJS Kesehatan
2.	<i>Change Agent System</i>	Kader BPJS Kesehatan
3.	<i>Client System</i>	Peserta Penunggak Iuran Di Kelurahan Kebon Jayanti
4.	<i>Support System</i>	a. Kader BPJS Kesehatan b. Kader PKK
5.	<i>Controlling System</i>	a. BPJS Kesehatan b. Kelurahan Kebon Jayanti
6.	<i>Implementing System</i>	Kader BPJS Kesehatan
7.	<i>Target System</i>	Peserta Penunggak Iuran Di Kelurahan Kebon Jayanti
8.	<i>Action System</i>	Kader BPJS Kesehatan

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau *Community Organization* dan *Community Development (CO/CD)*. Metode ini digunakan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik dan secara lebih mandiri. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar para penunggak iuran mampu memahami masalahnya, memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan yang aktif, memahami ketentuan dan proses pelaksanaan dari Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

2) Teknik

Teknik yang digunakan dalam program ini adalah teknik penyuluhan sosial. Dimana, penyuluhan sosial merupakan salah satu cara perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, edukasi, serta pelayanan kesejahteraan sosial kepada sasaran program baik secara lisan maupun tulisan. Teknik penyuluhan sosial digunakan untuk mengedukasi sasaran, menyampaikan persepsi, dan meyakinkan sasaran dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Rencana Anggaran

Untuk merealisasikan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dibutuhkan anggaran dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Rencana anggaran kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB)

No.	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pra Sosialisasi	ATK	5 paket	Rp 8.000	Rp 40.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Kertas HVS	1 rim	Rp 48.500	Rp 48.500
		Snack	8 box	Rp 6.000	Rp 48.000
		Jumlah			
2.	Sosialisasi	Spanduk	2 lembar	Rp 36.000	Rp 72.000
		Leaflet	20 lembar	Rp 1000	Rp 20.000
		<i>Sound System</i>	1 set	Rp 200.000	Rp 200.000

		Proyektor	1 set	Rp 150.000	Rp 150.000
		Honor Pemateri	1 orang	Rp1.500.000	Rp1.500.000
		Snack	60 box	Rp 5.000	Rp 300.000
		ATK	5 paket	Rp 8.000	Rp 40.000
		<i>Merchandise</i>	20 buah	Rp 5.000	Rp 100.000
		Jumlah			Rp1.882.000
3.	Pasca Sosialisasi	ATK	5 paket	Rp 8.000	Rp 40.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Snack	8 box	Rp 6.000	Rp 48.000
		Jumlah			Rp 55.500
4.	Dana Darurat				Rp 300.000
JUMLAH					Rp2.377.500

2) Daftar Alat dan Bahan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan tersebut. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Tabel 1.3 Daftar alat dan bahan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB)

Daftar Peralatan	Daftar Bahan
Laptop	Kertas Plano
Printer	Kertas HVS
Proyektor	Alat Tulis
<i>Microphone</i>	Spanduk

<i>Speaker</i>	Leaflet
Stop Kontak	Tinta Printer
Kipas Angin	Taplak Meja
Meja	Vas Bunga
Kursi	Nampan Baki

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu program. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT yang praktikan gunakan untuk menguji kelayakan dari kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh alternatif ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*).

Adapun hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4 Analisis SWOT sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB)

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program yang dilakukan dapat meringankan beban penunggak dalam melakukan pembayaran iuran secara bertahap. 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program belum menarik perhatian dari masyarakat; 2. Program tidak dapat dilakukan hanya 1 kali pertemuan.
<p style="text-align: center;">Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat dukungan dari pemerintah dengan penambahan kuota PBI-JK 2. Memiliki harga terjangkau dan tidak membedakan peserta; 3. Penduduk yang semakin antusias memiliki jaminan kesehatan. 	<p style="text-align: center;">Strategi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kesamaan standar pelayanan publik BPJS Kesehatan; 2. Memfasilitasi tempat pembayaran terdekat kepada peserta; 3. Mengoptimalkan kinerja SDM untuk hasil <i>output</i> pekerjaan yang maksimal. 	<p style="text-align: center;">Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah peserta dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya program JKN; 2. Memetakan peserta yang masih menunggak iuran dan diberikan sosialisasi, edukasi, dan ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan.
<p style="text-align: center;">Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi sebagian masyarakat yang masih buruk; 2. Tunggakan peserta yang jumlahnya cukup banyak; 3. Klaim BPJS Kesehatan sering tertunda. 	<p style="text-align: center;">Strategi (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi program JKN secara persuasif, jika keberadaan program bergantung pada iuran yang rutin dibayarkan setiap bulannya; 2. Melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan jika ada peserta menunggak dan datang berobat, bisa diberikan sosialisasi agar mereka segera melunasi. 	<p style="text-align: center;">Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan JKN serta melakukan tindakan preventif kepada peserta; 2. Melakukan pengecekan ulang pada fasilitas kesehatan agar pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN tetap baik.

h. Indikator Keberhasilan

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam program kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) adalah:

- 1) Peserta penunggak iuran BPJS Kesehatan Non-PBI dapat melunasi tagihannya;
- 2) Peserta penunggak iuran BPJS Kesehatan Non-PBI dapat merasakan keringanan dari beban banyaknya tagihan akibat tunggakan pembayaran;
- 3) Peserta BPJS Kesehatan Non-PBI dapat memperoleh manfaat perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya kembali.

i. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Jadwal Kegiatan

Berikut ini adalah susunan acara dalam tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Kegiatan akan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Tabel 1.5 Jadwal kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB)

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	08.00 - 08.15	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Lurah Kebon Jayanti
2.	08.15 - 08.45	Pemaparan Materi	Sie. Acara	Pentingnya Jaminan Kesehatan	Kader BPJS Kesehatan
3.	08.45 - 08.55	<i>Ice Breaking</i>	Sie. Acara	<i>Games</i>	Sie. Acara
4.	08.55 - 10.25	Pemaparan Materi	Sie. Acara	Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB)	Kader BPJS Kesehatan
5.	10.25 - 10.55	Diskusi	Sie. Acara	Tanya Jawab	a. Kader BPJS Kesehatan b. Kader PKK

6.	10.55 - 11.00	Penutupan	Sie. Acara	Foto Bersama	-
----	---------------	-----------	------------	--------------	---

2) Langkah-Langkah

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB):

a. Pra Sosialisasi

Tahap pra sosialisasi ini dilakukan selama 1 hari untuk mempersiapkan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah:

1. Membentuk tim kerja;
2. Mendata sasaran;
3. Menghubungi narasumber;
4. Merancang materi;
5. Menentukan lokasi kegiatan;
6. Menyebarkan undangan.

b. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dilaksanakan selama 1 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan seperti:

1. Pembukaan;
2. Pemaparan materi;
3. *Games* atau *ice breaking*;
4. Diskusi;
5. Penutup.

c. Pasca Sosialisasi

Tahap pasca sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dilaksanakan selama 1 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan kegiatan seperti:

1. Evaluasi kegiatan;
2. Menyusun laporan kegiatan.

2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

2.2.1 Gambaran Umum Masalah

Bantuan sosial adalah tidak selalu berada pada konteks pemberian bantuan dari negara, namun bantuan sosial ini dapat berasal dari kepada dana hibah

maupun dari masyarakat. Sifat bantuan ini tidak secara terus menerus diberikan dan harus secara selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Dalam hal ini, masyarakat berhak untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak untuk mencapai kesejahteraan. Seperti halnya di Kelurahan Kebon Jayanti yang terdapat beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakatnya.

Dengan adanya bantuan sosial tersebut memang sangatlah membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, secara umum masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kebon Jayanti pada saat pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan itu dapat berupa pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang masih kurang transparan dan pemberian bantuan sosial yang masih kurang optimal karena pada saat pemilihan penerima bantuan sosial masih menggunakan proses manual serta belum adanya sistem yang mendukung proses dalam menentukan penerima bantuan sosial yang ada di desa.

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan bantuan sosial, sehingga dapat berakibat pada bantuan sosial yang tidak sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukannya pengelolaan bantuan sosial yang lebih baik lagi dan harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

2.2.2 Tinjauan Konsep

a. Konsep Sumber Dana Bantuan Sosial

Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat namun sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan sosial ini diberikan dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, jenis bantuan sosial dapat diberikan berupa:

1. Bantuan langsung yang bisa diberikan secara tunai maupun barang;
2. Penyediaan aksesibilitas; dan
3. Penguatan kelembagaan.

Bentuk bantuan sosial dapat berupa makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar baik kesehatan maupun pendidikan, bimbingan teknis atau supervisi, dan penyediaan pemakaman. Dalam hal ini sumber dana bantuan sosial berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu:

1. Berasal dari negara

Dalam hal ini, dana bantuan sosial yang bersumber dari negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pajak akan dituangkan

dalam APBN/APBD dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat merencanakan bantuan sosial; mengelola bantuan sosial yang bersumber dari pajak melalui APBN/APBD; serta melakukan pengumpulan uang dan barang serta pengelolaan pajak undian yang dituangkan dalam bentuk dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

2. Berasal dari bantuan atau hibah luar negeri

Negara melalui Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memperoleh bantuan dari luar negeri dengan skema *government to government* (pemerintah negara lain kepada pemerintah pusat/daerah), atau *private to government* (swasta/masyarakat/organisasi dari luar negeri kepada pemerintah pusat/daerah), atau skema *private to private* (masyarakat/swasta/organisasi luar negeri kepada swasta/masyarakat/organisasi dalam negeri). Kemudian, untuk mekanisme pelaksanaan dan pelaporan penggunaan bantuan sosial dari luar negeri harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berasal dari masyarakat

Sesuai prinsip kesetiakawanan sosial bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Salah satu wujud peran serta masyarakat yaitu pemberian sumbangan sosial berupa uang atau barang bagi perorangan atau kelompok dengan tujuan agar dana yang terkumpul dapat membantu penanganan permasalahan sosial. Dana bantuan sosial yang bersumber dari masyarakat dapat dilakukan melalui dana hibah, sumbangan (pengumpulan uang dan barang), dan undian (pajak undian berhadiah). Dana bersumber dari masyarakat ini biasanya masih berbasis kearifan lokal. Contohnya seperti adanya kegiatan beras perelek, rereongan sarupi, beras jimpitan, dana santunan kematian, dana santunan kesehatan, dan sebagainya.

b. Penggalangan Dana

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) menyatakan bahwa Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) merupakan setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan kebudayaan. Penggalangan dana diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan (Juwani dalam Huda, 2012:27). Sedangkan menurut Suparman (2012), *fundraising* diartikan sebagai konsep dalam upaya mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*). Jadi, *fundraising* dapat diartikan sebagai konsep penggalangan dana dari masyarakat baik individu, organisasi maupun badan hukum, guna mempengaruhi masyarakat sehingga timbul

rasa kepedulian serta motivasi untuk mendonorkan sebagian hartanya demi terwujudnya tujuan-tujuan sosial.

Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan penggalangan dana di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 466.2/kep. 1023-bangsos/2002 tentang Panitia Pertimbangan Pemberian Izin/Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Kemudian, menurut Broce Thomas E dalam buku *Fund Raising: The Guide To Raising Money From Private Source*, terdapat 9 (sembilan) prinsip utama penggalangan dana yaitu:

1. Lembaga atau organisasi harus memiliki tujuan;
2. Memiliki tujuan pembangunan untuk memenuhi tujuan organisasi;
3. Memiliki sasaran yang jelas dalam program penggalangan dana;
4. Menunjukkan perkembangan secara alami;
5. Keterlibatan adalah kunci kepemimpinan dan dukungan;
6. Program yang dilaksanakan harus menggambarkan lembaga;
7. Perkembangan organisasi harus teliti dan realistis;
8. Mempertahankan kultivasi; dan
9. Sosialisasi akan berhasil jika prinsip satu sampai prinsip delapan sudah terpenuhi.

Adapun prinsip penggalangan dana menurut Stanley Weinstein adalah sebagai berikut:

1. *“People give to people to help people”* dengan arti “orang memberi kepada orang untuk menolong orang”;
2. *“People give relative to their means”* dengan arti “orang memberi sesuai kemampuan”;
3. Mereka yang menjabat dalam sebuah organisasi memberikan contoh atau teladan;
4. Membina hubungan yang positif dengan calon donatur; dan
5. Memiliki kiat-kiat sukses dalam menggalang dana, diantaranya:
 - a) Siapa yang tepat untuk calon donatur baik dari individu, keluarga, kelompok, perusahaan, pemerintahan, lembaga sosial;
 - b) Memiliki cara yang tepat dalam pelaksanaannya;

- c) Dilakukan pada waktu yang tepat;
- d) Merupakan program yang tepat; dan
- e) Dilakukan dengan cara yang benar.

c. Dana Santunan Kesehatan

Dana santunan kesehatan merupakan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk uang maupun buah tangan untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Tradisi atau budaya saling sambang atau menjenguk tetangga yang sedang sakit, hingga kini masih terlihat dan dipertahankan oleh masyarakat khususnya warga di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Ketika ada tetangga yang sakit ataupun *opname* di rumah sakit, mereka melakukan iuran untuk sumbangan uang maupun buah tangan atau tali asih. Sementara itu, misalkan jarak yang ditempuh cukup jauh, mereka akan beramai-ramai naik truk atau odong-odong dengan cara iuran untuk biaya angkutan dan sumbangan tadi.

Menjenguk orang sakit merupakan bagian dari suatu kegiatan sosial. Kegiatan menjenguk orang sakit ini diberlakukan untuk semua warga di wilayah tersebut. Untuk mekanisme pelaksanaan dan besaran iuran dana santunan kesehatan tersebut ditentukan sesuai kesepakatan dari RW masing-masing. Kemudian, ketika ada laporan bahwa salah satu warganya ada yang sedang sakit, maka warga yang lain memastikan dan menjenguk secara bersama-sama. Iuran ini memang bersifat sukarelawan, namun alangkah baiknya jika semuanya dapat berpartisipasi walaupun menyumbang dengan jumlah yang tidak cukup besar. Hal tersebut dapat mempererat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan antar warga.

Disini, menjenguk merupakan bagian atas upaya kita untuk memberikan perhatian lebih kepada orang yang sakit. Selain untuk meringankan beban dan mendoakannya, menjenguk orang sakit dapat menumbuhkan semangat, memotivasi, dan mensugesti dari pasien. Hal ini dapat menjadi kekuatan khusus dari dalam jiwanya untuk melawan sakit yang dialaminya karena perasaan yang cukup terhibur dengan kedatangan dari tetangga sekitarnya dan pastinya akan merasa lebih diperhatikan.

2.2.3 Asesmen

2.2.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi sumber adalah:

1) *Home Visit*

Home visit (kunjungan rumah atau tempat) merupakan salah satu teknik yang digunakan praktikan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah dari Ketua RW dan RT, ibu-ibu TP-PKK, serta beberapa warga di Kelurahan Kebon Jayanti. Hal itu dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi

terselesaikannya permasalahan terkait sumber dana bantuan sosial melalui kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan apa saja yang ada disana, sehingga *home visit* yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan sumber dana bantuan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti dan juga praktikan ingin mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.2.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber daya terkait isu masalah Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Mengidentifikasi permasalahan terkait sumber dana bantuan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti, apa saja jenis bantuan sosial dari masyarakat yang ada di Kelurahan Kebon Jayanti, bagaimana mekanisme dari bantuan sosial dari masyarakat yang ada, apa penyebab dan dampak dari adanya bantuan sosial dari masyarakat, apa kebutuhan dan potensi sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi dari pihak Ketua RT/RW, ibu-ibu TP-PKK, dan beberapa warga mengatakan bahwa terdapat bantuan sosial yang bersumber dari masyarakat berupa dana santunan kematian dan juga dana santunan kesehatan. Maka dari itu, saya sebagai praktikan memperoleh informasi lebih lanjut dengan menemui para warga Kelurahan Kebon Jayanti lainnya untuk mengetahui bagaimana mekanisme, penyebab, dan dampak dari kegiatan tersebut. Asesmen untuk menggali informasi dilakukan pada tanggal 27 Februari - 2 Maret 2023.

a. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah terkait dengan penggalangan dana dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat adalah:

1. Pelaksanaan dana santunan kematian

Santunan kematian merupakan bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga yang meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian antar masyarakat terhadap keluarga yang terkena musibah. Disini, keluarga yang ditinggalkan tidak usah repot untuk memikirkan perlengkapan dan makanan, dikarenakan ibu-ibu sudah menyiapkan bersama-sama. Mekanisme pelaksanaan santunan kematian ini dilakukan dengan cara iuran setiap bulannya. Untuk besaran

jumlah iuran tentunya per RW berbeda-beda. Ada yang 1 Kartu Keluarga (KK) iuran sebesar Rp10.000, ada juga yang Rp25.000 tergantung kebijakan RW masing-masing. Dana tersebut tidak perbulan menariknya, tetapi misal sekarang ada yang meninggal besok 2 hari kemudian baru diadakan penarikan. Namun, untuk pencatatan dan pelaporannya masih belum dilakukan.

2. Pengelolaan iuran dana santunan kesehatan yang belum optimal

Dana santunan kesehatan merupakan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk uang maupun buah tangan untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Mekanisme pelaksanaan dana santunan kesehatan ini dilakukan dengan cara iuran yang besaran jumlahnya masing-masing RW berbeda. Jika di RW 8 telah ditentukan sebesar Rp150.000, RW 9 sebesar Rp200.000, RW 13 sebesar Rp100.000, dan RW lainnya bersifat seikhlasnya. Kemudian warga yang ikut menjenguk akan memberikan sumbangannya hingga memenuhi besaran iuran yang telah ditentukan tersebut. Namun, dalam hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial akibat tidak semua warga berpartisipasi dan belum adanya pengelolaan dana yang maksimal dikarenakan penggalangan dana bersifat dadakan.

3. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak cair karena ketidaksesuaian data

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mencairkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa bantuan yang didapatkannya tidak kunjung cair. Hal itu dapat disebabkan karena adanya ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga komponen belum masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial setempat. Dari beberapa permasalahan di atas ada yang bisa di perbaiki dan ada juga yang tidak bisa di perbaiki. Apabila data sudah padan pun tidak bisa dipastikan apakah bantuannya akan dibayarkan atau tidak, karena semua kebijakan bantuan sosial bukan dari pemerintah daerah. Maka dari itu masyarakat perlu lebih memperhatikan lagi terkait dengan data yang dimilikinya.

4. Penyalahgunaan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah memberikan manfaat bagi penerima, namun pada implementasinya di Kelurahan Kebon Jayanti, program ini tidak selalu berjalan dengan baik. Dari sisi penerima manfaat, masih terdapat masalah yang sering terjadi seperti penyalahgunaan bantuan yang diberikan. Setelah mereka mencairkan uang tunai seharusnya mereka membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sembako. Namun, kadang ada penerima manfaat yang malah menggunakan uangnya untuk kepentingan lain seperti berbelanja barang yang bukan kebutuhan pokoknya.

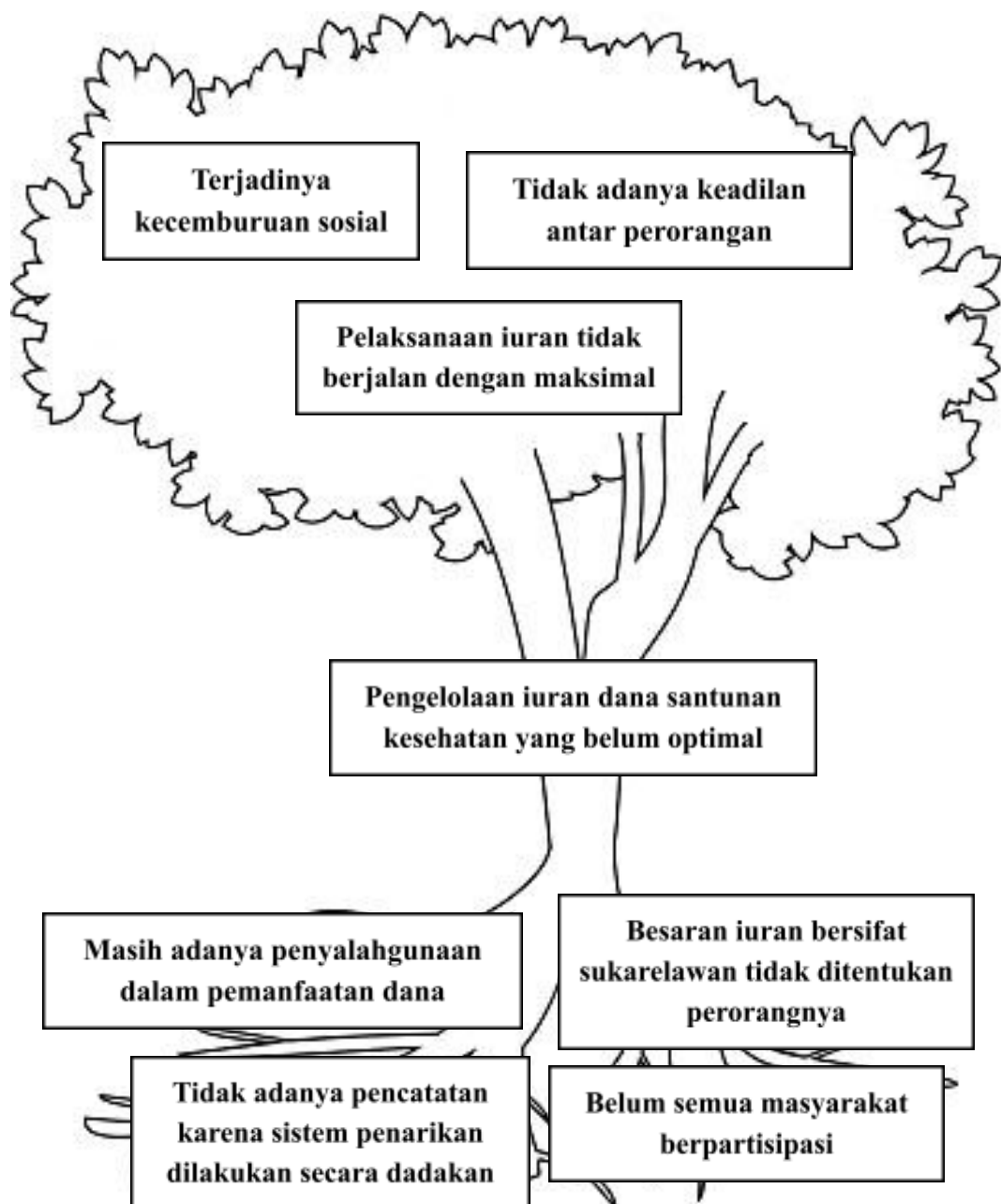
1) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dituliskan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan yaitu pengelolaan iuran dana santunan kesehatan yang belum optimal di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung.

2) Analisis Pohon Masalah

Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari permasalahan terkait pengelolaan iuran dana santunan kesehatan yang belum optimal.

Gambar 2.1 Analisis pohon masalah analisis sumber dana bantuan sosial



3) Penyebab Masalah

Penyebab dari permasalahan penyelenggaraan pengelolaan iuran dana santunan kesehatan di Kelurahan Kebon Jayanti disebabkan oleh:

a. Masih adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana

Dengan adanya kesadaran warga untuk mengadakan iuran dana santunan kesehatan telah memberikan banyak manfaat bagi si penerima. Mereka yang terkena musibah dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan ataupun meringankan biaya pengobatannya. Berdasarkan fakta di lapangan, terkadang masih ditemukan kasus seperti warga yang dilaporkan oleh Ketua RT yang katanya sakit dan perlu untuk dijenguk, ternyata setelah dijenguk malah kedapatan jalan-jalan layaknya orang yang sehat. Seharusnya perlu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh Ketua RT setempat, baru kalau sudah benar kabarnya dapat melaporkan dan melakukan penggalangan dana.

b. Besaran iuran bersifat sukarelawan tidak ditentukan perorangnya

Dalam pelaksanaan iuran dana santunan kesehatan ini tidak ditentukan berapa besar jumlahnya, melainkan bersifat sukarelawan. Jika ada warga yang mau ikut menjenguk ke rumah warga yang sedang sakit, maka warga yang ikut tersebutlah yang melakukan iuran seikhlasnya. Kemudian iuran tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diberikan kepada warga yang sakit saat penjengukan.

c. Belum semua masyarakat berpartisipasi

Dilakukannya program iuran dana santunan kesehatan ini memang memiliki manfaat bagi seluruh warga. Selain bermanfaat bagi penerima yang dapat terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya, program ini juga bermanfaat untuk menumbuhkan sifat kekeluargaan dan menciptakan kerukunan, serta menumbuhkan kebiasaan tolong-menolong di dalam masyarakat. Hal itu dapat tercapai apabila semua warga sukarela untuk ikut berpartisipasi. Namun, jika masih terdapat warga yang tidak ikut berpartisipasi, biasanya malah akan menimbulkan kesenjangan karena pasti ada yang sering ikut dan ada yang jarang ikut dalam pelaksanaan iuran tersebut.

d. Tidak adanya pencatatan karena sistem penarikan dilakukan secara dadakan

Selama ini, iuran dana santunan kesehatan ini dilakukan secara mendadak ketika ada laporan orang yang sakit saja. Maka dari itu, tidak adanya pencatatan dana masuk dan keluar dalam pengelolaannya. Memang sifatnya sukarela saja, namun alangkah baiknya jika semua warga turut berpartisipasi dengan adanya penarikan rutin untuk mengantisipasi masalah kesenjangan sosial. Selain itu, untuk menjaga transparansi pengelolaan dana juga dapat dilakukan pencatatan dan pelaporan setiap dilakukannya pengumpulan iuran.

4) Dampak Masalah

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan iuran dana santunan kesehatan yang terjadi di Kelurahan Kebon Jayanti dapat menimbulkan dampak seperti berikut:

a. Terjadinya kecemburuan sosial

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Dalam hal ini, kesenjangan sosial dapat terjadi ketika tidak semua warga ikut berpartisipasi dalam iuran dana santunan kesehatan yang dilakukan. Dikarenakan, berdasarkan observasi di lapangan, iuran tersebut hanya bersifat sukarelawan saja. Otomatis, terdapat warga yang sering ikut berpartisipasi dalam iuran dan ada juga warga yang jarang ikut berpartisipasi. Hal tersebutlah yang dapat memunculkan kesenjangan sosial antar warga.

b. Tidak adanya keadilan antar perorangan

Dalam hal ini ketidakadilan telah menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan sifat iuran yang sukarelawan dan tidak semuanya berpartisipasi, pasti akan menimbulkan perasaan tidak adil diantara warga. Padahal jika dilakukan secara bersama-sama, iuran yang telah ditentukan di setiap RWnya pasti akan terasa lebih ringan daripada bersifat sukarelawan dan tidak pasti jumlah warga yang ikut di setiap kegiatannya.

c. Pelaksanaan iuran tidak berjalan dengan maksimal

Jika perasaan ketidakadilan tadi mulai muncul, akan dapat menghambat pelaksanaan iuran dana santunan kesehatan. Dikarenakan, jika sudah muncul rasa ketidakadilan tadi, pasti salah seorang warga ada yang berpikiran bahwa tidak ingin ikut berpartisipasi terlebih dahulu agar memberi kesempatan bagi yang jarang berpartisipasi. Namun, hal itu malah membuat iuran tidak terkumpul dengan maksimal karena semakin sedikitnya warga yang turut berpartisipasi dalam kegiatan.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penyelesaian permasalahan tersebut adalah sosialisasi terkait standar, etika, dan cara penggalangan dana santunan kesehatan serta pelatihan pembuatan kartu iuran warga.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian masalah pengelolaan iuran dana santunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Sumber Formal:

a. Kelurahan Kebon Jayanti

Kelurahan memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial. Dimana, Kelurahan Kebon Jayanti memiliki peran

untuk melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala. Selain itu, kelurahan dapat berperan sebagai pengawas dan pemberi materi dalam kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya keberadaan kelurahan, diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti.

2. Sistem Sumber Informal:

a. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun informal. Tokoh masyarakat berperan dalam membina karang taruna. Oleh karena itu, tokoh masyarakat dianggap perlu untuk berpartisipasi dalam upaya penyelesaian masalah dalam pengelolaan dana santunan kesehatan di Kelurahan Kebon Jayanti. Peran tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk pengawasan terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Sistem Sumber Kemasyarakatan:

a. Tim Penggerak - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dianggap perlu menjadi salah satu potensi dan sumber penyelesaian masalah iuran pengelolaan dana santunan kesehatan. Dalam proses intervensi Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dapat berpartisipasi sebagai agen perubahan dan pelaksana kegiatan.

2.2.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Musibah berupa jatuh sakit merupakan hal yang tidak diinginkan, namun mungkin saja terjadi. Musibah ini pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut antara lain untuk kebutuhan sehari-harinya, biaya perawatan rumah sakit, biaya pengobatan, serta biaya pemulihan pasca terserang penyakit. Dengan adanya kegiatan sosial di masyarakat berupa dana santunan kesehatan sangatlah bermanfaat bagi warga yang sedang mengalami musibah tersebut. Mereka akan merasa diperhatikan dan sedikit terbantu dengan dana yang telah terkumpul dan dapat mendukung pada kesembuhan dari pasien.

Namun, di Kelurahan Kebon Jayanti ini pengelolaan terkait dana santunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dikarenakan masih belum adanya kesamaan iuran yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan belum adanya pencatatan serta pelaporan karena penarikan dilakukan secara mendadak. Tentu saja hal tersebut perlu dilakukan penanganan lebih lanjut agar semua warga

merasakan keadilan dan kegiatan iuran dana santunan kesehatan dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan fenomena di atas, praktikan akan membentuk program terkait pelatihan pembuatan kartu iuran warga.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Program pelatihan pembuatan kartu iuran warga dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana yang baik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan program pelatihan pembuatan kartu iuran warga adalah:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam kegiatan iuran dana santunan kesehatan;
- b. Untuk memberikan pemahaman terkait penyamarataan iuran setiap warga supaya adil;
- c. Untuk memberikan edukasi terkait pembuatan kartu iuran warga agar dana yang terkumpul dapat dilakukan pertanggungjawaban; dan
- d. Untuk mencegah potensi adanya tindak korupsi.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program pelatihan pembuatan kartu iuran warga akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai:

1. Wawasan terkait pentingnya dana santunan kesehatan;
2. Standar, etika, dan cara penggalangan dana santunan kesehatan yang baik dan benar;
3. Pembuatan kartu iuran warga.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam penyelenggaraan program pelatihan pembuatan kartu iuran warga. Sistem partisipan ini terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam penyelenggaraan program pelatihan pembuatan kartu iuran warga, telah ditentukan sistem partisipan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Sistem partisipan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
-----	--------------	----------------------

1.	<i>Initiator System</i>	a. Praktikan b. TP-PKK
2.	<i>Change Agent System</i>	TP-PKK
3.	<i>Client System</i>	a. Tokoh Masyarakat b. Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti
4.	<i>Support System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. TP-PKK
5.	<i>Controlling System</i>	Kelurahan Kebon Jayanti
6.	<i>Implementing System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. TP-PKK
7.	<i>Target System</i>	a. Tokoh Masyarakat b. Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti
8.	<i>Action System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. TP-PKK

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau *Community Organization* dan *Community Development (CO/CD)*. Metode ini digunakan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik dan secara lebih mandiri. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar para masyarakat dan Ketua RT/RW mampu mengartikulasikan masalah-masalahnya, memahami, dan menerapkan standar, etika, dan cara dalam melakukan penggalangan dana santunan kesehatan yang baik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Teknik

Teknik yang digunakan dalam program ini adalah teknik penyuluhan sosial dimana merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, dan edukasi baik secara lisan maupun tulisan. Para sasaran dalam hal ini pengelola dana santunan kesehatan akan diberi pemahaman dan edukasi terkait standar, etika, dan cara yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan penggalangan dana.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Rencana Anggaran

Dalam pelaksanaan program kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga dibutuhkannya anggaran dana untuk merealisasikan program dan penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam kegiatannya. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Rencana anggaran kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga

No.	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pra Sosialisasi	ATK	5 paket	Rp 6.000	Rp 30.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Kertas HVS	1 rim	Rp 41.000	Rp 41.000
		Snack	10 box	Rp 5.000	Rp 50.000
		Jumlah			
2.	Sosialisasi	Leaflet	30 lembar	Rp 1.000	Rp 30.000
		Spanduk	1 lembar	Rp 36.000	Rp 36.000
		ATK	20 paket	Rp 6.000	Rp 120.000
		<i>Sound System</i>	1 set	Rp 150.000	Rp 150.000
		Proyektor	1 set	Rp 100.000	Rp 100.000
		Snack	30 box	Rp 5.000	Rp 150.000
		Honor Pemateri	1 orang	Rp1.000.000	Rp1.000.000
		Jumlah			
3.	Pasca Sosialisasi	ATK	5 paket	Rp 6.000	Rp 30.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Snack	10 box	Rp 5.000	Rp 50.000
		Jumlah			

4.	Dana Darurat	Rp 200.000
JUMLAH		Rp1.994.400

2) Daftar Alat dan Bahan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan tersebut. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga.

Tabel 2.3 Daftar alat dan bahan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga

Daftar Peralatan	Daftar Bahan
Laptop	Alat Tulis
Printer	Kertas Plano
Proyektor	Kertas HVS
<i>Microphone</i>	Spanduk
<i>Speaker</i>	Leaflet
Stop Kontak	Tinta Printer
Meja	Taplak Meja
Kursi	Vas Bunga

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu program. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT yang praktikan gunakan untuk menguji kelayakan dari kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga.

Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga, serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh alternatif ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi

ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*).

Adapun hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Analisis SWOT kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga

<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program mendukung kearifan lokal yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti; 2. Program berguna bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat; 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program tidak dapat dilakukan hanya 1 kali pertemuan saja.
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pihak yang membutuhkan edukasi terkait standar, etika, dan cara penggalangan dana santunan kesehatan; 2. Berkembangnya rasa solidaritas masyarakat dalam tolong menolong; 3. Tersedianya media untuk menyebarkan informasi secara luas. 	<p>Strategi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kerjasama antara tim kerja dengan narasumber terkait; 2. Memanfaatkan media yang tersedia untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan sosialisasi. 	<p>Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan media yang ada untuk menjangkau sasaran dengan seefektif mungkin; 2. Menentukan ruang lingkup sasaran secara lebih rinci.
<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya dana santunan kesehatan; 2. Belum adanya pencatatan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. 	<p>Strategi (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat materi dan promosi untuk menyebarkan informasi yang dapat menarik perhatian sasaran melalui berbagai pendekatan; 2. Memanfaatkan SDM yang ada untuk melaksanakan kegiatan. 	<p>Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelatihan terkait pembuatan kartu iuran warga agar lebih terstruktur; 2. Membuat SOP, regulasi, dan sanksi yang tegas.

h. Indikator Keberhasilan

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam program kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga adalah:

- 1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan iuran dana santunan kesehatan;
- 2) Masyarakat dapat melakukan pertanggungjawaban melalui pembuatan kartu iuran warga
- 3) Dapat meminimalisir potensi adanya tindak korupsi.

i. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Jadwal Kegiatan

Berikut ini adalah susunan acara dalam tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga. Kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.

Tabel 2.5 Jadwal kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	08.00 - 08.15	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Lurah Kebon Jayanti
2.	08.15 - 09.15	Pemaparan Materi	Sie. Acara	Standar, etika, dan cara penggalangan dana santunan kesehatan	Aparat Kelurahan Kebon Jayanti
3.	09.15 - 09.30	<i>Ice Breaking</i>	Sie. Acara	<i>Games</i>	Sie. Acara
4.	09.30 - 11.00	Demonstrasi dan Pelatihan	Sie. Acara	Pelatihan terkait pembuatan kartu iuran warga	Aparat Kelurahan Kebon Jayanti
5.	11.00 - 11.30	Diskusi	Sie. Acara	Tanya Jawab	Aparat Kelurahan Kebon Jayanti
6.	11.30 - 11.45	Penutupan	Sie. Acara	Foto Bersama	-

2) Langkah-Langkah

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga:

a. Persiapan

Tahap persiapan akan dilakukan selama 1 hari untuk mempersiapkan kegiatan pelatihan pembuatan kartu iuran warga, adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kepanitiaan;
2. Mengidentifikasi narasumber;
3. Mendata sasaran;
4. Mempersiapkan sarana prasarana.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan selama 1 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan seperti:

1. Pembukaan;
2. Pemaparan materi;
3. *Games* atau *ice breaking*;
4. Demonstrasi dan pelatihan;
5. Diskusi;
6. Penutup.

c. Pasca Pelaksanaan

Tahap pasca kegiatan akan dilaksanakan selama 1 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan kegiatan seperti:

1. Evaluasi kegiatan;
2. Menyusun laporan kegiatan

2.3 Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

2.3.1 Gambaran Umum Masalah

Pemberdayaan adalah proses yang diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap 4 (empat) hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Kegiatan pemberdayaan sosial ini pada dasarnya selalu dimulai dari kondisi riil di masyarakat, hal ini mengingat esensi dari pemberdayaan adalah pentingnya kesadaran terhadap sejumlah masalah yang berada di sekitarnya (Zaenal Mukarrom 2008 : 80).

Manusia hidup selalu dihadapkan pada masalah kebutuhan dan keinginan atau pemuas kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar orang dapat bertahan hidup. Namun, hidup tidak selalu berjalan dengan lurus, terkadang entah itu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat juga mengalami hambatan sosial, moral dan material yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Sehingga, memerlukan bantuan orang lain untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Begitu juga dengan kondisi riil di Indonesia khususnya di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, yang masih banyak ditemui Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti ibu rumah tangga yang rawan ekonomi, adanya pengangguran, pemulung yang berada pada garis kemiskinan, kedisabilitas yang tidak berdaya, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Jika hal itu tidak segera ditangani secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, maka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut semakin terhambat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menimbulkan citra buruk terhadap pemerintah dan daerah setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemberdayaan lebih lanjut yang dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, peningkatan keterampilan, dan upaya pemberdayaan sosial lainnya.

2.3.2 Tinjauan Konsep

a. Konsep Pemberdayaan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan menurut Kementerian Sosial RI, pemberdayaan sosial (*empowerment*) merupakan strategi peningkatan "daya" atau kekuatan (*power*) individu, lembaga dan komunitas. Kebijakan pemberdayaan sosial perlu lebih berorientasi pada strategi pencapaian tujuan (*goals-oriented strategy*). Pemberdayaan sosial harus dikembangkan dengan konsep yang *simple*, terarah dan terukur serta berorientasi pada strategi pencapaian tujuan.

Pemberdayaan sosial merupakan intervensi pekerja sosial yang ditujukan untuk:

1. Memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan
2. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial ini dilakukan melalui:

- a. Identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan;
- b. Penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi;
- c. Pelatihan keterampilan;
- d. Penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
- e. Pendampingan;
- f. Kemitraan dan penggalangan dana;
- g. Pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- h. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- i. Supervisi dan advokasi sosial;

- j. Penguatan keserasian sosial; dan/atau
- k. Bimbingan lanjut.

b. Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Salah satu alasan pengangguran selalu muncul adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (*job search*) adalah suatu proses seseorang untuk mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan juga keterampilan sesuai yang dimiliki oleh mereka. Namun, jika semua pekerja dan pekerjaan tidak ada bedanya, maka tidak menutup kemungkinan bagi para pekerja bahwa mereka cocok dengan pekerjaan apa saja, akan tetapi pada kenyataannya bakat dan juga kemampuan seseorang itu berbeda-beda (Mankiw dkk, 2012).

Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat 2 (dua) cara untuk menggolongkannya yaitu berdasarkan alasan mengapa mereka menganggur dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*). Kategori pengangguran berdasarkan alasan mengapa mereka menganggur mengelompokkan pengangguran ke dalam beberapa kategori diantaranya:

1. Pengangguran Friksional, bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik.
2. Pengangguran Struktural, dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat.
3. Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksi.
4. Pengangguran Musiman, pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian.

Sedangkan, pengangguran yang ditinjau dari pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*) didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja ini dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Menganggur (*Unemployed*), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini juga sering dijuluki sebagai pengangguran terbuka (*open unemployed*).

2. Setengah Menganggur (*Underemployed*), yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam.
3. Bekerja Penuh (*Employed*), yaitu orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

Dengan adanya pengangguran yang semakin meningkat dapat memunculkan dampak negatif seperti terganggunya stabilitas perekonomian dan terganggunya stabilitas sosial politik. Maka dari itu, perlu dicari solusi untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi.

c. Balai Latihan Kerja (BLK)

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, Balai Latihan Kerja (BLK) adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/ atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secara umum keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) membuka beberapa bidang kejuruan contohnya seperti Kejuruan Teknisi Komputer, Kejuruan Operator Komputer, Kejuruan Teknik Pendingin, Kejuruan Tata Graha, Kejuruan Teknik Sepeda Motor, Kejuruan Tata Busana, Kejuruan Tata Boga dan lain sebagainya. Bahkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) juga bisa memfasilitasi untuk keahlian dalam bidang bahasa asing seperti, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dan Bahasa Korea Selatan.

Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan sebuah wadah yang menampung kegiatan pelatihan yang fungsinya untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori. Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja. Dalam menempuh pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK) tidak menuntut peserta pelatihannya untuk menjadi pekerja dengan keahlian yang mereka punya, peserta pelatihan dapat membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga Balai Latihan Kerja (BLK) dapat menjadi motor dalam mengurangi pengangguran.

2.3.3 Asesmen

2.3.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi sumber adalah:

1) *Home Visit*

Home visit (kunjungan rumah atau tempat) merupakan salah satu teknik yang digunakan praktikan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengunjungi langsung rumah dari beberapa warga di Kelurahan Kebon Jayanti. Hal itu dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terselesaikannya permasalahan terkait pemberdayaan melalui kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan apa saja yang ada disana, sehingga *home visit* yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan pemberdayaan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti dan juga praktikan ingin mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.3.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber daya terkait isu masalah Analisis Pemberdayaan Sosial yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Mengidentifikasi permasalahan terkait pemberdayaan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti, apa saja jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti, permasalahan yang dialami oleh PMKS yang ada, apa penyebab dan dampak dari permasalahan, apa kebutuhan dan potensi sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi dari pihak Kelurahan Kebon Jayanti, TP-PKK, dan beberapa warga mengatakan bahwa masih terdapat beberapa pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti. Maka dari itu, saya sebagai praktikan memperoleh informasi lebih lanjut dengan menemui para warga Kelurahan Kebon Jayanti lainnya untuk mengetahui penyebab dan dampak dari adanya permasalahan tersebut. Asesmen untuk menggali informasi dilakukan pada tanggal 13 - 16 Maret 2023.

a. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat adalah:

1. Banyaknya ibu rumah tangga yang rawan ekonomi

Kemiskinan masih melanda sebagian masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti. Berdasarkan data, mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai pekerja sektor informal bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan. Sementara itu, untuk istrinya kebanyakan tidak bekerja hanya dirumah saja. Bagi keluarga yang tergolong miskin, hal itu akan mengakibatkan kesengsaraan dalam

hidupnya karena mereka merasa kurang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, para ibu rumah tangga dapat diberdayakan agar bisa membantu perekonomian dari keluarganya serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti

Berdasarkan data penduduk berdasarkan mata pencaharian, Kelurahan Kebon Jayanti ini terdapat sejumlah 68 orang yang belum bekerja. Artinya, mereka yang belum bekerja tadi dapat dikatakan masih menganggur. Pengangguran merupakan permasalahan yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia, akan tetapi permasalahan pengangguran tidak dapat dibiarkan begitu saja. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat sangat rendah. Dalam hal ini, perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran khususnya di Kelurahan Kebon Jayanti.

3. Banyaknya pemulung di sekitar pasar

Jika dilihat dari aspek lingkungan, Kelurahan Kebon Jayanti ini memiliki sebuah pasar yang cukup luas. Seperti pada umumnya, pasar memiliki tingkat konsumsi oleh masyarakat perkotaan yang cukup tinggi, hal itu jelas akan menyisakan banyak sampah. Apalagi, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terdapat permasalahan seperti tidak lagi bisa beroperasi dikarenakan penuh. Dengan banyaknya sampah di lingkungan sekitar, otomatis para pemulung juga cukup banyak di daerah tersebut. Dikarenakan, mereka mencari nafkah dengan cara jalan memungut serta memanfaatkan sampah, kemudian dijual kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi. Namun, aktivitas pemulung tersebut dirasa cukup membahayakan bagi dirinya karena terlalu beresiko.

4. Kurangnya pemahaman karang taruna 'Bina Muda' akan peran dan fungsinya

Karang Taruna di Kelurahan Kebon Jayanti Bernama Karang Taruna "Bina Muda" yang berarti Pembinaan Pemuda. Pada tahun 2023 ini, Karang Taruna berada pada periode ketujuh yang dipimpin oleh Kang Indra. Namun, setelah dilakukan analisis, Karang Taruna ini berada dalam keadaan pasif. Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna. Pada Bulan Desember 2022 yang lalu, terdapat Kegiatan Roadshow yang dilakukan dengan pembahasan mengenai Bimtek Ekonomi Kreatif, Kartamart UMKM Karang Taruna, Bazaar UMKM, dan Program Sosial. Namun, tidak ada salah satu dari program yang dibahas pada Kegiatan Roadshow tersebut dilaksanakan. Permasalahan lain yang juga muncul adalah juga kurangnya kehadiran dan partisipasi anggota dalam proses pertemuan Karang Taruna.

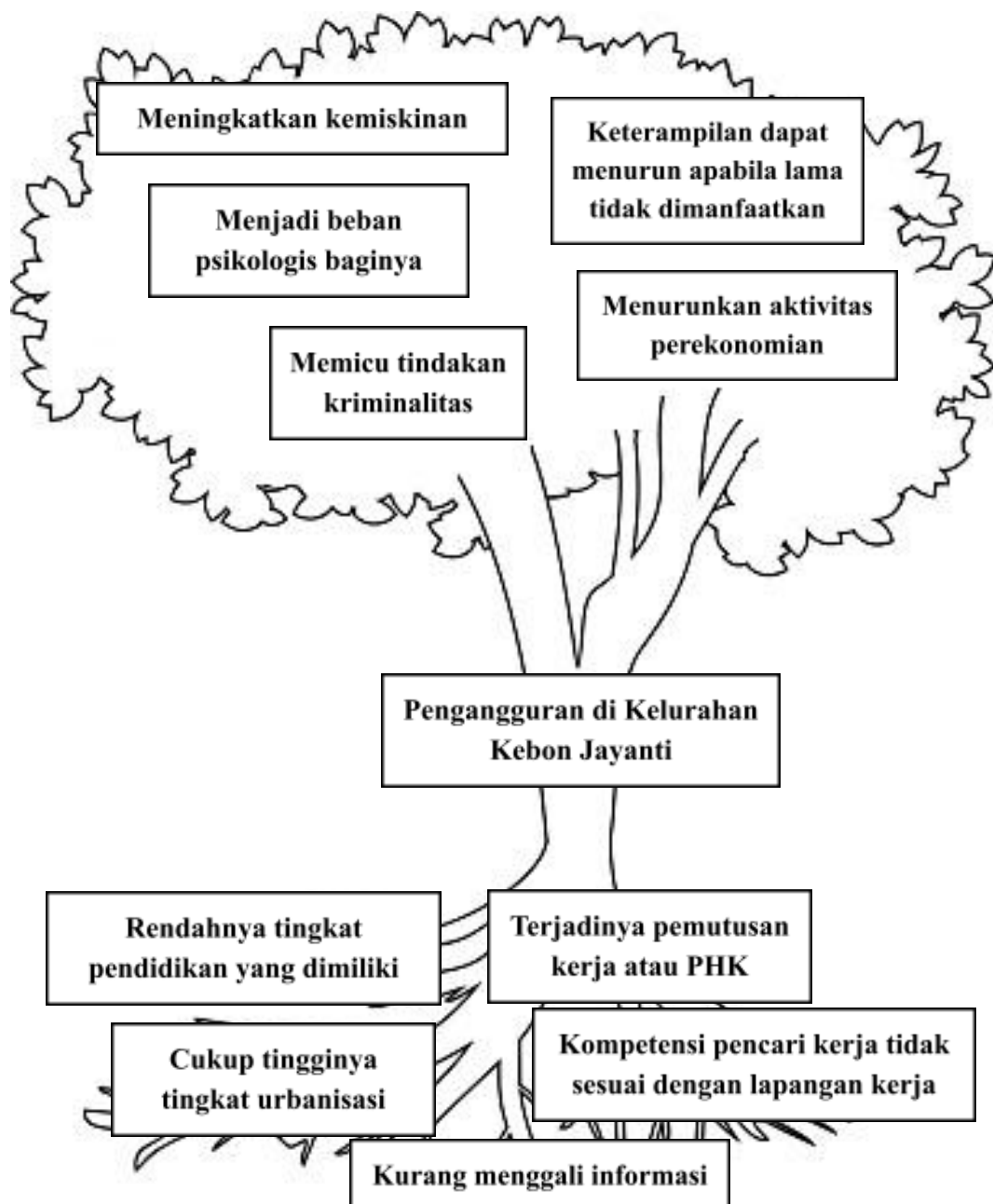
1) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dituliskan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan yaitu pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti.

2) Analisis Pohon Masalah

Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari permasalahan terkait pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti.

Gambar 3.1 Analisis pohon masalah analisis pemberdayaan sosial



3) Penyebab Masalah

Penyebab dari permasalahan pemberdayaan sosial khususnya pada pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti disebabkan oleh:

a. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki

Pendidikan dan pengangguran memiliki hubungan satu sama lain, dimana semakin tinggi rata-rata pendidikan di suatu daerah maka akan mengalami peningkatan pada kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapat pekerjaan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya. Akhirnya, masyarakat akan kurang juga dalam hal produktivitasnya.

b. Cukup tingginya tingkat urbanisasi

Salah satu dampak buruk urbanisasi adalah tingginya angka pengangguran di perkotaan. Hal ini disebabkan karena sebagian datang dari desa tanpa dibekali pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk melamar pekerjaan di kota. Selain itu, lapangan pekerjaan yang tersedia juga terbatas, apalagi biaya hidup di kota yang sangat tinggi menjadikan masyarakat desa semakin sulit untuk meningkatkan harapan hidupnya. Jika urbanisasi terus dilakukan, maka pengangguran di kota bisa menjadi meningkat drastis.

c. Terjadinya pemutusan kerja atau PHK

Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini tengah marak terjadi di Indonesia. Banyak perusahaan teknologi maupun perusahaan rintisan atau dikenal dengan *'startup'* mengalami fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang umumnya terjadi akibat dampak ekonomi. Dengan peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka akan bertambah pula daftar pengangguran di daerah tersebut. Pengangguran menyebabkan orang tidak memiliki pendapatan sehingga daya beli masyarakat menurun hingga mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa dan berdampak pada perekonomian negara.

d. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja

Adanya pengangguran disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Kesempatan kerja ini bersifat terbatas karena pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerjanya yang berdampak pada sedikitnya kesempatan kerja dan meningkatkan potensi terjadinya pengangguran.

e. Kurang menggali informasi

Informasi mengenai lapangan pekerjaan merupakan hal yang penting dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Namun, tidak semua orang dapat mengakses informasi tersebut karena keterbatasan atau kurang

meratanya persebaran informasi sehingga para pencari kerja kesulitan untuk mengetahuinya.

4) Dampak Masalah

Permasalahan terkait dengan pemberdayaan sosial khususnya pada pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti dapat menimbulkan dampak seperti berikut:

a. Meningkatkan kemiskinan

Ditinjau dari segi ekonomi pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Hal itu dikarenakan banyaknya yang menganggur berdampak terhadap rendahnya pendapatan ekonomi dari mereka. Sementara itu, biaya hidup tetap terus berjalan. Tentunya hal ini akan membuat mereka tidak dapat hidup secara mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidupnya.

b. Menurunkan aktivitas perekonomian

Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini menyebabkan para pengusaha dan investor tidak bersemangat melakukan perluasan dan mendirikan industri baru sehingga aktivitas perekonomian menjadi turun.

c. Menjadi beban psikologis baginya

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengangguran bisa membawa dampak permasalahan sosial bagi masyarakat. Khususnya beban psikologis yang akan dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki pekerjaan, mulai dari munculnya ketimpangan status sosial sampai dengan rendahnya kesejahteraan hidup. Dalam hal ini, menjadi pengangguran dapat membentuk koping yang tidak sehat, sehingga dapat semakin meningkatkan stres.

d. Memicu tindakan kriminalitas

Pengangguran dapat berujung pada tindakan kriminal karena situasi dan kondisi yang membuat seseorang tidak dapat berpikir jernih dan menekan seseorang untuk mencari jalan keluar demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kriminalitas semakin meningkat, akan merugikan berbagai pihak dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

e. Keterampilan dapat menurun apabila lama tidak dimanfaatkan

Dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang. Hal itu dapat mengakibatkan mereka terjebak dengan label penganggurannya, jika tidak diasah kembali keterampilan yang dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penyelesaian permasalahan tersebut adalah program peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian masalah pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti adalah sebagai berikut:

1. Sistem Sumber Formal:

a. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dianggap memiliki peran dalam upaya penyelesaian masalah pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti. Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab terhadap jumlah pengangguran yang ada di Kota Bandung pastilah memiliki program-program khusus di dalam mengatasi masalah pengangguran khususnya dalam masalah perluasan kerja, perluasan kerja berfungsi sebagaimana masalah yang ada di dalam masalah. Dalam proses intervensi, Dinas Tenaga Kerja dapat berpartisipasi sebagai narasumber, sistem inisiator, sistem pendukung dan pengawas kegiatan.

b. Kelurahan Kebon Jayanti

Kelurahan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya pada para pengangguran. Dalam hal ini, kelurahan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala. Selain itu, kelurahan dapat berperan sebagai pengawas dalam kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Dengan adanya keberadaan kelurahan, diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan terkait pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti.

2. Sistem Sumber Informal:

a. Ketua RT/RW

Ketua RT/RW merupakan orang-orang yang memahami bagaimana masyarakatnya dan memiliki pengaruh di masyarakat. Oleh karena itu, Ketua RT/RW dianggap perlu untuk berpartisipasi dalam upaya penyelesaian masalah pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti tidak memahami peran dan fungsinya.

3. Sistem Sumber Kemasyarakatan:

a. Balai Latihan Kerja

Balai Latihan Kerja (BLK) dalam hal ini memiliki potensi dalam peningkatan kapasitas pada para pengangguran. Balai Latihan Kerja (BLK) memainkan peran signifikan dalam menyiapkan tenaga kerja yang handal, terampil, dan siap pakai. Berbagai program dan pelatihan yang

diadakan BLK diharapkan dapat membantu para pencari kerja agar dapat terserap dalam lapangan kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

2.3.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah serius yang sedang dihadapi, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian di suatu daerah. Pengangguran yang terlalu besar juga akan membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Disini, pengangguran harus segera diatasi melalui berbagai cara. Salah satunya adalah program latihan kerja yang perlu diprioritaskan baik dalam rangka menghadapi era globalisasi dan persaingan dunia, maupun untuk mengatasi dampak krisis ekonomi mengurangi pengangguran. Dalam melaksanakan pelatihan kerja itu sendiri hendaknya diarahkan ke sektor-sektor lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga pelatihan kejuruan yang diikuti akan membantu menjamin angkatan kerja dapat bekerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka praktikan akan membentuk program peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Program peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dilaksanakan untuk mendukung calon tenaga kerja yang siap pakai serta berkualitas dan berkompeten dalam mengurangi pengangguran.

2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan program peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) adalah:

- a. Memperoleh tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi terhadap pekerjaannya;
- b. Meningkatkan kualitas dan daya saing peserta;
- c. Mampu menciptakan peluang usaha sendiri tanpa harus menunggu kesempatan kerja karena keterampilan yang diberikan merupakan keterampilan yang siap pakai;
- d. Mengurangi angka pengangguran dan membuka kesempatan kerja yang baru.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian penyuluhan dan bimbingan kepada para pengangguran mengenai:

1. Penyuluhan tentang pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK);
2. Bimbingan berupa pelatihan berbasis kompetensi; dan
3. Pendampingan sosial pasca pelatihan.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Sistem partisipan ini terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), telah ditentukan sistem partisipan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Sistem partisipan kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	a. Praktikan b. Ketua RT/RW
2.	<i>Change Agent System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. Dinas Tenaga Kerja
3.	<i>Client System</i>	Pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti
4.	<i>Support System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. Dinas Tenaga Kerja c. Balai Latihan Kerja
5.	<i>Controlling System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. Dinas Tenaga Kerja
6.	<i>Implementing System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. Dinas Tenaga Kerja
7.	<i>Target System</i>	Pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti

8.	<i>Action System</i>	Dinas Tenaga Kerja
----	----------------------	--------------------

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau *Community Organization* dan *Community Development (CO/CD)*. Metode ini digunakan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik dan secara lebih mandiri. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar para pengangguran dapat menciptakan peluang kerjanya sendiri dan terbebas dari masalah perekonomian.

2) Teknik

a. Penyuluhan Sosial

Teknik penyuluhan sosial digunakan agar sasaran dalam hal ini pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti diberi pemahaman dan edukasi tentang pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah bagi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial dilakukan untuk mendukung dan memberdayakan sasaran kegiatan. Teknik ini digunakan dalam tahap pasca kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Pendampingan sosial digunakan untuk mendukung sasaran yang telah diberikan peningkatan kapasitas agar mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan dalam kegiatan pelatihan sebelumnya.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dibutuhkannya anggaran dana untuk merealisasikan program dan penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam kegiatannya. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Rencana anggaran kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)

No.	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Persiapan Penyuluhan	ATK	5 paket	Rp 8.000	Rp 40.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Kertas HVS	1 rim	Rp 48.500	Rp 48.500
		Snack	5 box	Rp 5.000	Rp 25.000
		Jumlah			
2.	Pelaksanaan Penyuluhan	ATK	30 paket	Rp 3.000	Rp 90.000
		<i>Sound System</i>	1 set	Rp 150.000	Rp 150.000
		Proyektor	1 set	Rp 150.000	Rp 100.000
		Leaflet	68 bendel	Rp 1.000	Rp 68.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Spanduk	1 lembar	Rp 36.000	Rp 36.000
		Snack	68 box	Rp 5.000	Rp 340.000
		Honor Pemateri	2 orang	Rp1.000.000	Rp2.000.000
		Jumlah			
3.	Pasca Pelaksanaan Penyuluhan	ATK	5 paket	Rp 8.000	Rp 40.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Snack	5 box	Rp 5.000	Rp 25.000
		Jumlah			
4.	Dana Darurat				Rp 200.000
JUMLAH					Rp3.173.000

2) Daftar Alat dan Bahan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan tersebut. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

Tabel 3.3 Daftar alat dan bahan kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)

Daftar Peralatan	Daftar Bahan
Laptop	Kertas Plano
Printer	Kertas HVS
<i>Sound System</i>	Alat Tulis
Proyektor	Modul
Meja	Tinta Printer
Kursi	Taplak Meja

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu program. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT yang praktikan gunakan untuk menguji kelayakan dari kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), serta dapat menyusun strategi untuk memperoleh alternatif ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*).

Adapun hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Analisis SWOT kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan mengacu kepada SKKNI; 2. Program dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti. 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program tidak bisa dilakukan dengan instan dikarenakan membutuhkan cukup banyak waktu.
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pelatihan yang akan menciptakan keahlian dan keterampilan; 2. Lulusan pelatihan bisa membuka usaha mandiri dan bekerja di perusahaan; 3. Terbukanya kesempatan yang luas dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. 	<p>Strategi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengembangkan BLK; 2. Memanfaatkan banyaknya pengangguran yang belum mempunyai keahlian; 3. Memanfaatkan terbukanya kesempatan yang luas dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. 	<p>Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pemerintah pusat untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan sesuai SKKNI agar pelatihan menjadi berbasis kompetensi; 2. Meningkatkan pendanaan dengan cara meningkatkan kerjasama dalam hal pendanaan dengan pihak ketiga.
<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelatihan di BLK belum merata; 2. Perkembangan teknologi yang cepat; 3. Tidak adanya monitoring terhadap alumni pelatihan BLK. 	<p>Strategi (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan yang inovatif dan kreatif yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar; 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dan manfaat pelatihan bagi masa depan; 3. Melakukan monitoring pada alumni BLK untuk melihat keberhasilan. 	<p>Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengenalan dan promosi melalui berbagai media; 2. Memperbaiki fasilitas teknologi informasi untuk kegiatan; 3. Melakukan dan meningkatkan monitoring terhadap alumni BLK.

h. Indikator Keberhasilan

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam program kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) adalah:

- 1) Diperolehnya tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi terhadap pekerjaannya;
- 2) Dapat meningkatkan kualitas dan daya saing khususnya untuk masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti;
- 3) Terciptanya peluang usaha sendiri tanpa harus menunggu kesempatan kerja karena keterampilan yang diberikan merupakan keterampilan yang siap pakai.

i. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Jadwal Kegiatan

Berikut ini adalah susunan acara dalam tahap pelaksanaan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.

Tabel 3.5 Jadwal kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	08.00 - 08.15	Pembukaan	Sie Acara	Sambutan	Lurah Kebon Jayanti
2.	08.15 - 09.15	Pemaparan Materi	Sie Acara	Pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK)	Dinas Tenaga Kerja
3.	09.15 - 09.30	<i>Ice Breaking</i>	Sie Acara	<i>Games</i>	Sie Acara
4.	09.30 - 11.30	Diskusi	Sie Acara	Tanya Jawab	Dinas Tenaga Kerja
5.	11.30 - 12.00	Penutupan	Sie Acara	Foto Bersama	-

2) Langkah-Langkah Kegiatan

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK):

a. Pra Penyuluhan

Tahap pra sosialisasi ini dilakukan selama 1 hari untuk mempersiapkan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya keberadaan

Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah:

1. Membentuk tim kerja;
2. Mendata sasaran;
3. Menghubungi narasumber;
4. Merancang materi;
5. Menentukan lokasi kegiatan;
6. Menyebarkan undangan.

b. Pelaksanaan Penyuluhan

Tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dilaksanakan selama 1 hari yang nantinya diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), mau meningkatkan daya saing, serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Dimana, dalam tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan seperti:

1. Pembukaan;
2. Pemaparan materi;
3. *Games* atau *ice breaking*;
4. Diskusi;
5. Penutup.

c. Pasca Penyuluhan

Tahap pasca peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dilaksanakan selama 7 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan kegiatan seperti:

1. Pendampingan sosial;
2. Evaluasi kegiatan;
3. Menyusun laporan kegiatan.

2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

2.4.1 Gambaran Umum Masalah

Perkembangan kota yang sangat besar ini hampir tidak terkendali, yang secara tidak langsung telah menimbulkan berbagai dampak pada kondisi manusia maupun lingkungan. Berkembangnya kawasan-kawasan strategis di kota, menjadi menarik minat penduduk pedesaan untuk bekerja di kota, dimana mereka menganggap bekerja di kota dapat meningkatkan kualitas hidup. Otomatis jika penduduk desa pindah ke kota akan meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan.

Jika perpindahan penduduk tersebut terus terjadi terus menerus dan semakin tidak terkendali, malah akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kota tersebut. Diantaranya yaitu munculnya gejala kemiskinan di perkotaan, ketimpangan *income* perkapita, pengangguran, kriminalitas, polusi udara dan suara, pertumbuhan daerah kumuh, banyaknya sampah, dan sebagainya. Intinya,

akan menjadi beban bagi lingkungan perkotaan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, budaya, dan estetika.

Para pengelola pembangunan baik pemerintah maupun swasta, harus memperhatikan semua kendala tersebut. Kemudian, nantinya diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan suatu mekanisme kerja yang terpadu, serta turut sertanya masyarakat dan instansi-instansi penegak hukum yang dihimbau agar dapat turut serta dalam mengelola pembangunan kota, khususnya yang berwawasan lingkungan. Pengelola pembangunan kota yang berwawasan lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosialnya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penataan lingkungan merupakan konsep pembangunan kota yang bersifat prasarana fisik, bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar kita dan menjadikan kawasan kota yang berwawasan lingkungan dan bernuansakan alam agar masyarakat dapat merasa nyaman dan terwujudnya kehidupan yang sejahtera.

2.4.2 Tinjauan Konsep

a. Konsep Penataan Lingkungan

Program penataan lingkungan merupakan bagian dari penataan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang atau lingkungan adalah konsep dasar pembangunan yang bertujuan menjelaskan langkah- langkah pembangunan dengan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan kota, dan menjadikan kawasan kota menjadi lebih tertib, bersih, bebas polusi serta menjadikan kota bernuansakan lingkungan yang masih alami, guna menjamin fungsi pelestarian fungsi lingkungan. Dalam undang-undang tersebut penataan lingkungan memiliki tujuan diantaranya:

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan;
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya; dan
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Penataan lingkungan dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan berdaya guna. Penataan lingkungan hidup yang baik akan terpelihara kualitas lingkungan. Berdasarkan fungsi utama kawasan, penataan lingkungan hidup dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kawasan lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Contoh : hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan cagar alam, dan sebagainya.
2. Kawasan budidaya, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Contoh : lahan budidaya jagung, kayu, sawah, dan lain-lain.

Konsep penataan lingkungan secara global berarti mencakup satu kesatuan wilayah. Menurut Setyo Moersidik, kunci untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup adalah dengan dilakukannya sebuah pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Prinsip penataan berhubungan erat dengan konservasi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber daya alam lainnya.

b. Sampah

Menurut *World Health Organization (WHO)*, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sedangkan, menurut kamus lingkungan, sampah merupakan bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur, atau materi berlebihan atau buangan. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Menurut Ari Nilandari (2006), adapun jenis-jenis dari sampah padat berdasarkan asalnya dapat digolongkan seperti:

1. Sampah Organik

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran, dan karton merupakan perkecualian. Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka di dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik.

Kemudian, menurut Agung Suprihatin, dkk (1996), sumber sampah berasal dari:

1. Sampah dari Pemukiman

Umumnya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.

2. Sampah dari Pertanian dan Perkebunan

Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemar lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.

3. Sampah dari Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya : kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya : semen, pasir, batu bata ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng.

4. Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

Sampah yang berasal dari perdagangan seperti : toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoin, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

5. Sampah dari Industri

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

c. Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lain, seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, pelibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta dan lain-lain.

Salah satu tindakan dari pengelolaan sampah dilakukan melalui adanya program bank sampah. Secara istilah, bank sampah terdiri dari dua kata, yaitu kata “Bank” dan “Sampah”. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu “*Banque*” yang berarti tempat penukaran uang. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi dan dilakukan dengan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).

Tujuan didirikannya bank sampah adalah untuk memecah permasalahan sampah yang saat ini belum juga teratasi dengan baik, membiasakan warga agar tidak membuang sampah sembarangan, mengiming-imingi warga agar mau memilah sampah sehingga lingkungannya bersih, memaksimalkan pemanfaatan barang bekas, menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa barang bekas bisa berguna, dan mengurangi jumlah barang bekas yang terbuang percuma. Sedangkan, manfaat dari adanya bank sampah adalah mengurangi jumlah sampah di lingkungan masyarakat. menambah penghasilan bagi masyarakat. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta memupuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidupnya.

Standar manajemen bank sampah adalah standar pengelolaan, bank sampah pada penabung sampah/nasabah, pelaksana bank sampah, pengepul/pembeli/industri daur ulang, pengelolaan sampah di bank sampah, dan peran pelaksana bank sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 menyebutkan bahwa mekanisme kerja Bank Sampah di Indonesia yaitu:

1. Masyarakat yang menjadi nasabah memilah sampah. Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah adalah koran, majalah, kardus, dupleks, botol plastik, plastik bening, besi, aluminium, timah dan sebagainya;
2. Nasabah menyerahkan sampah yang sudah terpilah ke bank sampah. Sampah yang diserahkan dalam keadaan bersih dan utuh karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dalam pemilahan sampah, penabung disarankan untuk membawa 3 kelompok besar sampah ke dalam 3 kantong yang berbeda yaitu kantong untuk plastik, kantong kedua untuk sampah sejenis kertas dan kantong ketiga untuk logam;
3. Penimbangan. Sampah yang telah diserahkan dan dipilih, selanjutnya ditimbang oleh petugas bank sampah;
4. Pencatatan. Sampah yang sudah ditimbang akan dicatat oleh petugas bank sampah. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan. Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut disosialisasikan kepada penabung. Besaran bagi hasil yang umum adalah 85:15, 85% untuk penabung dan 15% untuk pelaksanaan bank sampah. Jatah

15% untuk pelaksana bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksana.

2.4.3 Asesmen

2.4.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi sumber adalah:

1) *Home Visit*

Home visit (kunjungan rumah atau tempat) merupakan salah satu teknik yang digunakan praktikan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah dari Ketua RW dan RT, ibu-ibu TP-PKK, serta beberapa warga di Kelurahan Kebon Jayanti. Hal itu dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terselesainya permasalahan terkait penataan lingkungan sosial melalui kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan apa saja yang ada disana, sehingga *home visit* yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan penataan lingkungan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti mengenai sampah dan juga praktikan ingin mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.4.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber daya terkait isu masalah Analisis Penataan Lingkungan Sosial yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Mengidentifikasi permasalahan terkait penataan lingkungan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti, adakah permasalahan sampah di Kelurahan Kebon Jayanti, bagaimana pengelolaan sampah yang ada, apa penyebab dan dampak dari adanya sampah, apa kebutuhan dan potensi sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi dari pihak Ketua RT/RW, ibu-ibu TP-PKK, dan beberapa warga mengatakan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik. Maka dari itu, saya sebagai praktikan memperoleh informasi lebih lanjut dengan menemui para warga Kelurahan Kebon Jayanti lainnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah, penyebab, dan dampak

dari adanya sampah. Asesmen untuk menggali informasi dilakukan pada tanggal 27 - 30 Maret 2023.

a. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah terkait dengan penyelenggaraan penataan lingkungan sosial di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat adalah:

1. Pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi bagi setiap kota besar. Pengelolaan sampah perlu dilakukan melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Kelurahan Kebon Jayanti sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi. Permasalahan pengelolaan sampah menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga kesadaran pengelolaan sampah masih sering diabaikan.

2. Tidak adanya ketegasan fungsi yang jelas dari saluran drainase di Kelurahan Kebon Jayanti

Permasalahan drainase di perkotaan terjadi begitu kompleks, tidak terkecuali terjadi juga di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong. Di Kelurahan Kebon Jayanti, terdapat permasalahan terkait dengan drainase yang begitu kompleks. Kepadatan dan kemajemukan penduduk di Kelurahan Kebon Jayanti menjadi salah satu sumber permasalahannya. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberfungsian dari drainase, karena permasalahan drainase salah satunya timbul dari aktivitas masyarakat. Akan tetapi, aktivitas masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti membuat kondisi saluran drainase ini jauh dari kata bersih. Menurut hasil observasi yang dilakukan praktikan, kondisi air drainase di Kelurahan Kebon Jayanti berwarna hitam, berbau, dan dipenuhi dengan sampah. Kondisi ini disebabkan karena kesadaran masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti akan kebersihan lingkungan masih kurang.

3. Maraknya PKL yang Berdagang di Trotoar dan Bahu Jalan Pasar Kiaracondong

Jalan Kiaracondong atau sekarang telah diganti namanya menjadi Jalan Ibrahim Adjie mempunyai aktivitas yang cukup beragam. Aktivitas masyarakat yang dilakukan mulai dari perdagangan dan jasa, industry, permukiman, dan pendidikan. Dari banyaknya aktivitas tersebut memicu timbulnya pedagang kaki lima untuk berjualan di sepanjang jalan, baik di trotoar maupun bahu jalan. Selain itu adanya Pasar Tradisional Kiaracondong dan Stasiun Kereta Api Kiaracondong yang juga masuk di wilayah Kelurahan

Kebon Jayanti juga menjadi daya Tarik yang kuat karena aktivitas jual beli di pasar tradisional akan mempengaruhi pembeli untuk melakukan transaksi jual beli di sekitar pasar tersebut.

4. Pencemaran Lingkungan akibat pengelolaan *Septic Tank* Komunal yang tidak maksimal

Septic Tank Komunal merupakan program Pemerintah Kota Bandung untuk mengurangi resiko kesehatan di Kota Bandung. Salah satu wilayah yang mendapatkan program ini adalah kelurahan Kebon Jayanti. Namun pengelolaan *Septic Tank* Komunal di Kelurahan Kebon Jayanti masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pencemaran lingkungan yang masih terjadi yang berasal dari kotoran manusia.

5. Penataan Pedagang Pasar yang Kurang Maksimal

Pasar Tradisional Kiaracondong dan Stasiun Kereta Api Kiaracondong merupakan salah satu daya tarik yang kuat di Kelurahan Kebon Jayanti karena aktivitas jual beli di pasar tradisional akan mempengaruhi pembeli untuk melakukan transaksi jual beli di sekitar pasar tersebut. Namun fungsi dari penataan lahan di pasar kiaracondong ini tidak maksimal terbukti dengan lantai dua pasar kiaracondong yang tidak digunakan untuk aktivitas berdagang dan ketidaktegasan dari pengelola pasar untuk menertibkan pedagang pasar. Pedagang lebih memilih berdagang di area bawah pasar berdempetan dengan selokan dan tempat pembuangan sampah yang nantinya menimbulkan rentan resiko kesehatan masyarakat.

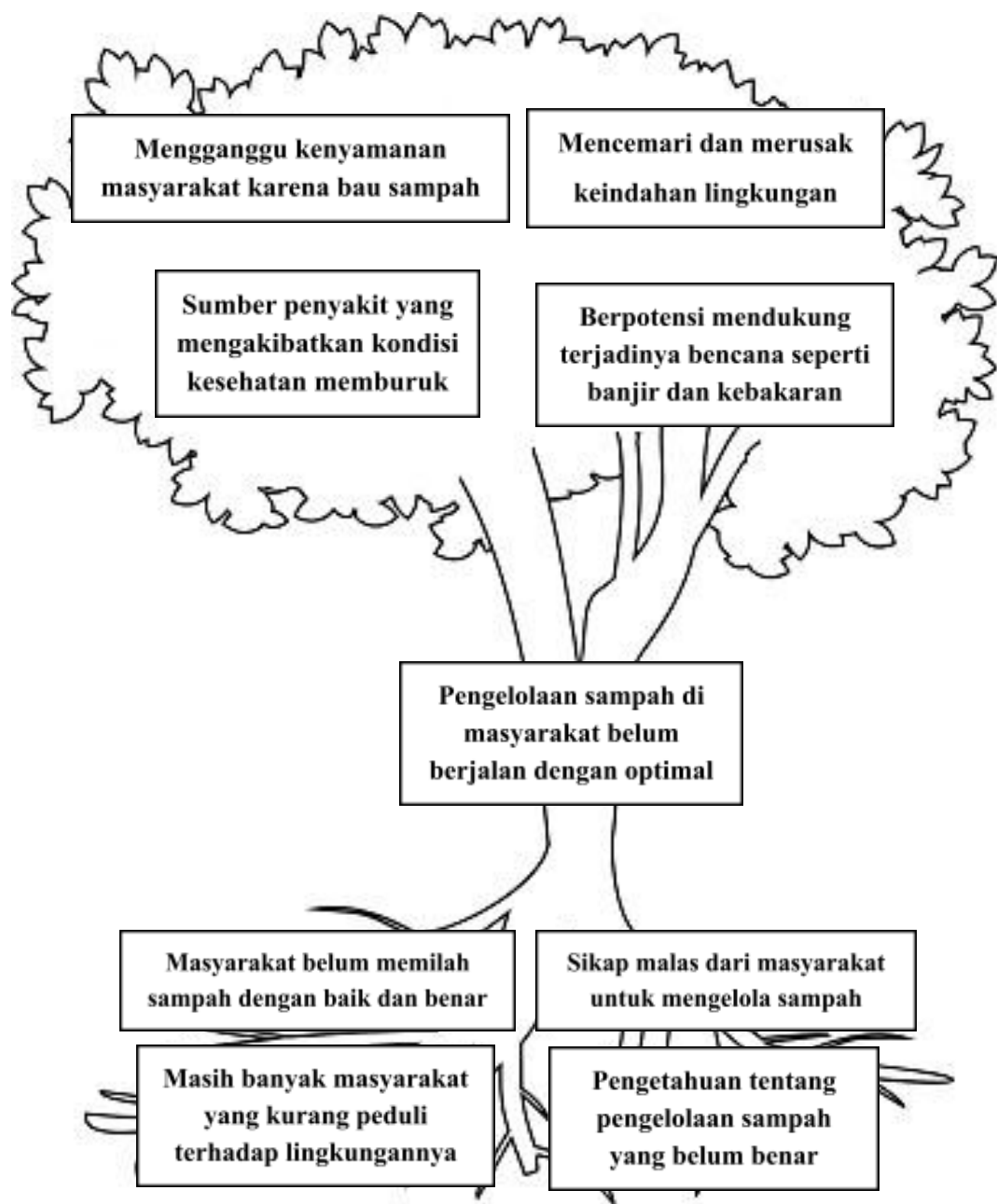
- 1) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dituliskan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan yaitu pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal.

- 2) Analisis Pohon Masalah

Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari permasalahan terkait pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal.

Gambar 4.1 Analisis pohon masalah analisis penataan lingkungan sosial



3) Penyebab Masalah

Penyebab dari permasalahan penataan lingkungan sosial khususnya pada pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal disebabkan oleh:

a. Masyarakat belum memilah sampah dengan baik dan benar

Sampah yang dihasilkan oleh manusia hendaknya dipilah sesuai dengan jenisnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah menimbulkan ketidaktahuan masyarakat tentang jenis-jenis sampah sehingga muncul perilaku tidak memilah sampah ketika akan dibuang. Sehingga semua jenis sampah tercampur menjadi satu dan menimbulkan masalah yang lainnya.

- b. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungannya
Paradigma pengelolaan sampah “kumpul-angkut-buang” yang masih dipegang masyarakat, menumbuhkan sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah. Masyarakat hanya mengumpulkan sampah di rumah lalu dibuang ke tempat lain yang mereka sebut sebagai tempat pembuangan sampah. Ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan menimbulkan banyak permasalahan sampah seperti menumpuknya sampah di sekitar lingkungan permukimannya.
- c. Sikap malas dari masyarakat untuk mengelola sampah
Adanya sikap masyarakat yang malas terhadap pengelolaan sampah yang benar, menyebabkan timbulnya permasalahan sampah yang tidak berkesudahan. Sikap malas menimbulkan sikap tidak tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang telah dihasilkan. Masyarakat kebanyakan malas untuk memilah jenis sampah dengan benar, membuang sampah ke tempatnya dan mengelola sampah dengan benar.
- d. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang belum benar
Berdasarkan penelitian terhadap persepsi masyarakat terhadap sampah berdasarkan topografinya menunjukkan bahwa kecenderungan persepsi masyarakat terhadap sampah adalah positif. Masyarakat menyatakan bahwa sampah memiliki peran penting terhadap keberlangsungan lingkungan. Tetapi dibalik persepsi tersebut, masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui cara mengelola sampah yang baik dan benar. Masyarakat masih berpegang pada paradigma pengelolaan sampah “kumpul-angkut-buang”. Sehingga sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih buruk.

4) Dampak Masalah

Permasalahan terkait dengan penataan lingkungan sosial khususnya pada pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal dapat menimbulkan dampak seperti berikut:

- a. Mengganggu kenyamanan masyarakat karena bau sampah
Keberadaan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dalam beraktivitas. Bau tidak sedap yang dihasilkan dari pembusukan sampah dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu sampah yang berserakan di tempat umum dapat mengganggu mobilitas masyarakat.
- b. Mencemari dan merusak keindahan lingkungan
Pengelolaan sampah yang buruk dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Pencemaran tanah oleh sampah terjadi karena pembuangan sampah sembarangan terutama sampah plastik yang sulit untuk diurai oleh mikroorganisme sehingga akan menjadi racun yang menyerap ke dalam tanah. Racun yang mencemari tanah tersebut akan terus menyerap kedalam tanah sehingga akan mengkontaminasi air

tanah. Sampah- sampah yang dibuang sembarangan ke saluran air seperti sungai dan laut akan merusak struktur air alami sehingga air akan tercemar. Sampah yang dibakar atau dibiarkan membusuk akan mengakibatkan pencemaran udara karena asap dan penguapan zat hasil pembusukan yang terserap oleh udara. Pencemaran-pencemaran tersebut dapat mengganggu stabilitas lingkungan hidup dan juga merusak pemandangan lingkungan.

c. Sumber penyakit yang mengakibatkan kondisi kesehatan memburuk

Polemik yang terjadi terkait sampah berserakan di sekitar pemukiman adalah rendahnya kualitas lingkungan itu sendiri. Akibat rendahnya kualitas lingkungan dapat mengakibatkan beberapa penyakit seperti penyakit disentri, disebabkan karena makanan yang dikonsumsi berasal dari lingkungan tidak bersih dan terkontaminasi dengan bakteri. Selain itu, penyakit malaria yang terjadi karena gigitan dari nyamuk yang tentunya hadir dari lingkungan kumuh akibat genangan air. Serta tuberculosis (TBC) yang mudah menular melalui udara dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

d. Berpotensi mendukung terjadinya bencana seperti banjir dan kebakaran

Sikap tidak peduli dan malas masyarakat dalam mengelola sampah menjadikan sampah-sampah tersebut terbuang sembarangan baik itu di sungai, saluran air, atau di pinggir jalan. Sampah-sampah yang berserakan karena tidak dikelola dengan baik tersebut dapat menyumbat saluran air atau sungai. Sehingga sungai atau saluran air tersebut dapat meluap dan menimbulkan banjir ke pemukiman warga. Selain itu, masih terdapat warga yang membakar sampah miliknya. Hal itu jelas dilarang oleh Pemerintah Kota Bandung karena dapat menyebabkan polusi udara hingga kebakaran yang terjadi akibat pembakaran sampah secara sembarangan.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penyelesaian permasalahan tersebut adalah penyuluhan terkait bank sampah.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian masalah pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal adalah sebagai berikut:

1. Sistem Sumber Formal:

a. Kelurahan Kebon Jayanti

Kelurahan Kebon Jayanti dianggap perlu menjadi salah satu potensi dan sumber penyelesaian masalah pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal. Dalam proses intervensi Kelurahan Kebon Jayanti dapat berpartisipasi sebagai sistem pengawas kegiatan.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam permasalahan kebersihan lingkungan suatu wilayah. Salah satu tugas dinas kebersihan dan pertamanan adalah membina dan pelaksana tugas kebersihan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dianggap perlu menjadi salah satu potensi dan sumber penyelesaian masalah pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal. Dalam proses intervensi Dinas Lingkungan Hidup dapat berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan terkait bank sampah.

2. Sistem Sumber Informal:

a. Ketua RT/RW

Ketua RT/RW memiliki tugas untuk membangun, membina dan memberdayakan masyarakatnya. Oleh karena itu kepala desa dianggap perlu menjadi salah satu potensi dan sumber penyelesaian masalah pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal. Dalam proses intervensi kepala desa dapat berpartisipasi sebagai sistem inisiator.

3. Sistem Sumber Kemasyarakatan:

a. Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dianggap perlu menjadi salah satu potensi dan sumber penyelesaian masalah pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal. Dalam proses intervensi Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dapat berpartisipasi sebagai sistem pendukung, agen perubahan, perencanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan.

b. Karang Taruna

Karang taruna merupakan organisasi pemuda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, karang taruna dianggap perlu menjadi salah satu potensi dan sumber penyelesaian masalah pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optimal. Dalam proses intervensi karang taruna dapat berpartisipasi sebagai agen perubahan, perencanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan.

2.4.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2008), pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat yang bertambah banyak, apabila tidak diiringi dengan pengelolaan sampah yang optimal akan

menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat memberikan dampak merugikan bagi masyarakat secara luas. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, karena sampah timbul dari aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk setiap permasalahan sampah yang ada. Munculnya berbagai macam masalah terkait sampah disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah yang benar. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sampah yang menumpuk di sekitar pemukiman, tersumbatnya saluran air dan pencemaran lingkungan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah memberikan dampak buruk baik untuk lingkungan maupun masyarakat, seperti masyarakat tidak memilah sampah, kenyamanan masyarakat terganggu, banjir, pencemaran lingkungan, menimbulkan penyakit, mengurangi keindahan, dan menambah beban pembiayaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka praktikan akan mencoba untuk memberikan penyuluhan terkait pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan baik dan benar di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracandong.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Penyuluhan terkait bank sampah ini bertujuan untuk terwujudnya pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti yang sehat.

2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan penyuluhan terkait bank sampah adalah:

- a. Untuk memecah permasalahan sampah yang sampai saat ini belum juga bisa teratasi dengan baik;
- b. Untuk membiasakan warga agar tidak membuang sampah sembarangan;
- c. Untuk memotivasi warga agar mau memilah sampah sehingga lingkungannya bersih;
- d. Untuk memaksimalkan pemanfaatan barang bekas dengan menanamkan pemahaman pada masyarakat bahwa barang bekas bisa berguna; dan
- e. Untuk mengurangi jumlah barang bekas yang terbuang percuma yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Penyuluhan terkait bank sampah akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti mengenai:

1. Tata cara pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan baik dan benar;

2. Motivasi dan kesadaran terkait pentingnya pengelolaan sampah.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam penyelenggaraan penyuluhan terkait bank sampah. Sistem partisipan ini terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam penyelenggaraan penyuluhan terkait bank sampah, telah ditentukan sistem partisipan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Sistem partisipan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	a. Praktikan b. Ketua RT/RW
2.	<i>Change Agent System</i>	a. TP-PKK b. Karang Taruna
3.	<i>Client System</i>	a. Ibu-Ibu Rumah Tangga b. Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti
4.	<i>Support System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. TP-PKK
5.	<i>Controlling System</i>	Kelurahan Kebon Jayanti
6.	<i>Implementing System</i>	a. TP-PKK b. Karang Taruna c. Dinas Lingkungan Hidup
7.	<i>Target System</i>	Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Kebon Jayanti
8.	<i>Action System</i>	a. TP-PKK b. Karang Taruna

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah *Community Organization* dan *Community Development (CO/CD)*. Metode ini digunakan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas

kehidupan yang lebih baik dan secara lebih mandiri. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti mampu mengartikulasikan masalah-masalahnya, memahami, dan menerapkan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

2) Teknik

a. Penyuluhan Sosial

Teknik yang digunakan dalam program ini adalah teknik penyuluhan sosial. Dimana para sasaran dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Kebon Jayanti diberi pemahaman, edukasi, dan motivasi terkait pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan baik dan benar.

b. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial dilakukan untuk mendukung dan memberdayakan sasaran kegiatan. Teknik ini digunakan dalam tahap pasca kegiatan penyuluhan terkait bank sampah untuk mendukung masyarakat yang telah diberikan bimbingan dan penyuluhan dapat mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang telah diberikan untuk kedepannya.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah dibutuhkannya anggaran dana untuk merealisasikan program dan penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam kegiatannya. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Rencana anggaran kegiatan penyuluhan terkait bank sampah

No.	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Persiapan	ATK	5 paket	Rp 5.000	Rp 25.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Kertas HVS	1 rim	Rp 41.000	Rp 41.000
		Snack	10 box	Rp 5.000	Rp 50.000

		Jumlah			Rp 119.500
2.	Pelaksanaan	ATK	89 paket	Rp 2.000	Rp 178.000
		<i>Sound System</i>	1 set	Rp 150.000	Rp 150.000
		Proyektor	1 set	Rp 100.000	Rp 100.000
		Spanduk	1 lembar	Rp 36.000	Rp 36.000
		Alat Peraga	1 set	Rp 330.000	Rp 330.000
		Snack	62 box	Rp 5.000	Rp 310.000
		Honor Pematari	2 orang	Rp1.000.000	Rp2.000.000
		Jumlah			
3.	Pasca Pelaksanaan	ATK	5 paket	Rp 5.000	Rp 25.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Snack	10 box	Rp 5.000	Rp 50.000
		Jumlah			
4.	Dana Darurat				Rp 150.000
JUMLAH					Rp3.452.000

2) Alat yang Dibutuhkan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

Tabel 4.3 Daftar alat dan bahan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah

Daftar Peralatan	Daftar Bahan
Laptop	Kertas Plano

Proyektor	Kertas HVS
<i>Sound System</i>	Alat Tulis
Printer	Tinta Printer
Meja	Taplak Meja
Kursi	Contoh Sampah
Tempat Sampah	Plastik
Timbangan	Karung
Gunting	Lem

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu program. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT yang praktikan gunakan untuk menguji kelayakan dari kegiatan penyuluhan terkait bank sampah.

Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat menyusun strategi untuk memperoleh alternatif ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*), mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*). Adapun hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Analisis SWOT kegiatan penyuluhan terkait bank sampah

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat; 2. Program dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program membutuhkan lahan yang cukup luas dan cukup banyak peralatan yang digunakan.
<p style="text-align: center;">Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA; 2. Dapat mengurangi pembiayaan pengelolaan sampah; 3. Berpotensi meningkatkan pembiayaan daerah karena dapat dijadikan kampung wisata lingkungan. 	<p style="text-align: center;">Strategi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih; 2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta dalam pengembangan bank sampah. 	<p style="text-align: center;">Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan untuk anggota bank sampah atau calon tenaga kerja di bank sampah; 2. Melakukan sosialisasi antar bank sampah untuk mengetahui bagaimana cara pengolahan yang baik dan benar; 3. Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta untuk mengadakan sarana prasarana.
<p style="text-align: center;">Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersaing dengan pemulung dalam harga penjualan barang bekas; 2. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah; 3. Kurangnya fasilitas yang dimiliki dalam pengelolaan sampah. 	<p style="text-align: center;">Strategi (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank sampah melakukan komunikasi kepada pemulung atau pengepul untuk menjadi mitra atau pemulung menjadi anggota nasabah bank sampah; 2. Meminta bantuan kepada pemerintah yang ikut serta dalam pembangunan bank sampah untuk penambahan alat teknologi terbaru. 	<p style="text-align: center;">Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih lokasi yang tepat untuk bank sampah sebagai tempat penyimpanan yang tertata rapi, bukan di rumah pengurus bank sampah; 2. Meminta kepada dinas lingkungan hidup agar dapat menentukan harga sampah-sampah yang akan disetorkan oleh nasabah.

h. Indikator Keberhasilan

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam program kegiatan penyuluhan bank sampah adalah:

- 1) Warga terbiasa untuk tidak membuang sampah sembarangan;
- 2) Warga termotivasi dalam memilah sampah agar lingkungannya bersih;
- 3) Warga melakukan pemanfaatan barang bekas secara maksimal; dan
- 4) Berkurangnya jumlah barang bekas yang terbuang percuma dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

i. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Jadwal

Berikut ini adalah susunan acara dalam tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah. Kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Tabel 4.5 Jadwal kegiatan penyuluhan terkait bank sampah

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	09.00 - 09.15	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Perwakilan Ketua RW
2.	09.15 - 09.45	Pemaparan Materi I	Sie. Acara	Tata Cara Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Dengan Baik dan Benar	TP-PKK
3.	09.45 - 09.55	<i>Ice Breaking</i>	Sie. Acara	<i>Games</i>	Sie. Acara
4.	09.55 - 10.35	Pemaparan Materi II	Sie. Acara	Motivasi dan Penyadaran Terkait Pentingnya Pengelolaan Sampah	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5.	10.35 - 11.35	Demonstrasi dan praktik	Semua Panitia	Bank Sampah	a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan b. TP-PKK c. Karang

					Taruna
6.	11.35 - 11.40	Penutup	Sie.Acara	Foto Bersama	-

2) Langkah-Langkah

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah:

a. Pra Sosialisasi

Tahap pra sosialisasi ini dilakukan selama 1 hari untuk mempersiapkan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah:

1. Membentuk tim kerja;
2. Mengidentifikasi peserta kegiatan;
3. Mengidentifikasi narasumber;
4. Menyusun materi kegiatan;
5. Menentukan lokasi kegiatan;
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana.

b. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan kegiatan penyuluhan terkait bank sampah dilaksanakan selama 1 hari yang nantinya diharapkan dapat terwujudnya pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti yang sehat. Dimana, dalam tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan seperti:

1. Pembukaan;
2. Pemaparan materi I;
3. *Games* atau *ice breaking*;
4. Pemaparan materi II;
5. Demonstrasi dan praktik pengelolaan dan pemeliharaan;
6. Penutup.

c. Pasca Sosialisasi

Tahap pasca kegiatan penyuluhan terkait bank sampah dilaksanakan selama 1 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan kegiatan seperti:

1. Pendampingan masyarakat;
2. Evaluasi kegiatan;
3. Menyusun laporan kegiatan.

2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana

2.5.1 Gambaran Umum Masalah

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, sejak tahun 2001 Pemerintah Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

Di dalam undang-undang tersebut, diamanatkan untuk dibentuk badan baru, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan adanya perubahan sistem khususnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maka alokasi dana untuk penanggulangan bencana, baik itu di tahap mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi tetap memiliki alokasi yang cukup. Sementara aturan tentang dana cadangan juga sudah diatur oleh undang-undang tersebut.

Dalam hal ini, mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana, mitigasi adalah tahap awal penanggulangan bencana alam seperti sosialisasi terhadap masyarakat tanda-tanda akan terjadinya bencana, memberi peringatan untuk tidak berada di lokasi yang akan terjadi bencana, bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari solusi agar tidak terjadi bencana karena untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana, supaya tidak ada korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana. Maka dari itu, praktikan akan menganalisis lebih lanjut terkait mitigasi bencana dengan harapan masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung dapat siap tanggap terhadap potensi bencana yang akan terjadi di daerahnya.

2.5.2 Tinjauan Konsep

a. Konsep penanggulangan Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Bencana

a) Pencegahan

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi ancaman. Pada tahap pencegahan dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana (*disaster management*

plan). Rencana ini adalah rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dari pra bencana sampai pasca bencana, akan tetapi terbatas pada apa kegiatan yang akan dilaksanakan, dan siapa pelakunya serta sumber dana yang akan dipakai.

b) Mitigasi atau Pengurangan

Mitigasi atau pengurangan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan nonfisik.

c) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Hal ini bertujuan agar warga mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana.

2. Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera setelah bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Pada tahap tanggap darurat dilakukan pengaktifan rencana operasi (*operation plan*) yang merupakan operasionalisasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontijensi. Contoh tindakan tanggap darurat adalah:

a) Evakuasi;

b) Pencarian dan penyelamatan.;

c) Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD);

d) Penyediaan kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi, pangan, sandang, papan, kesehatan, konseling;

e) Pemulihan segera fasilitas dasar seperti telekomunikasi, transportasi, listrik, pasokan air untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap darurat.

3. Pasca Bencana

a) Pemulihan

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Contoh tindakan pemulihan antara lain seperti perbaikan sarana/prasarana sosial dan ekonomi; penanggulangan kejiwaan pasca bencana (*post traumatic stress*) melalui penyuluhan, konseling, terapi kelompok (disekolah) dan perawatan; pemulihan gizi/kesehatan; serta pemulihan sosial ekonomi sebagai upaya peningkatan ketahanan masyarakat.

b) Pembangunan kembali

Pembangunan kembali adalah program jangka panjang untuk membangun kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula dengan melaksanakan upaya memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar. Contoh tindakan pembangunan kembali yang berkelanjutan seperti membangun prasarana dan pelayanan dasar fisik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, lingkungan, pembaharuan rencana tata ruang wilayah, sistem pemerintahan dan ketahanan lainnya yang memperhitungkan faktor risiko bencana.

b. Banjir

Menurut Rahayu, dkk (2009), banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut IDEP (2007), banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi.

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2006), menyatakan bahwa banjir diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Berdasarkan asal sumber air

a) Banjir Lokal

Banjir lokal disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dan belum tersedianya sarana drainase memadai. Banjir lokal ini lebih bersifat setempat, sesuai dengan luas sebaran hujan lokal. Banjir ini semakin parah apabila saluran drainase tidak berfungsi secara optimal, dimana saluran tersebut tersumbat sampah, sehingga mengurangi kapasitas penyalurannya.

b) Banjir Kiriman

Banjir kiriman ini disebabkan oleh peningkatan debit air sungai yang mengalir. Banjir ini diperparah oleh kiriman dari daerah atas. Sebagian besar sebagai akibat bertambah luasnya daerah terbangun dan mengubah koefisien aliran di daerah tangkapan, sehingga semakin banyak air yang menjadi aliran permukaan, sebaliknya semakin sedikit air meresap menjadi air tanah.

2. Berdasarkan air

a) Banjir Air

Banjir yang satu ini adalah banjir yang sudah umum. Penyebab banjir ini adalah meluapnya air sungai, danau, atau selokan sehingga air akan meluber lalu menggenangi daratan. Umumnya banjir seperti ini disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus sehingga sungai atau danau tidak mampu lagi menampung air.

b) Banjir Cileunang

Jenis banjir yang satu ini hampir sama dengan banjir air. Namun banjir cileunang ini disebabkan oleh hujan yang sangat deras dengan debit air yang sangat banyak. Banjir akhirnya terjadi karena air-air hujan yang melimpah ini tidak bisa segera mengalir melalui saluran atau selokan di sekitar rumah warga. Jika banjir air dapat terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka banjir cileunang adalah banjir dadakan (langsung terjadi saat hujan tiba).

c) Banjir Bandang

Tidak hanya banjir dengan materi air, tetapi banjir yang satu ini juga mengangkut material cair berupa lumpur. Banjir seperti ini jelas lebih berbahaya daripada banjir air karena seseorang tidak akan mampu berenang ditengah-tengah banjir seperti ini untuk menyelamatkan diri. Banjir bandang mampu menghanyutkan apapun, karena itu daya rusaknya sangat tinggi. Banjir ini biasa terjadi di area dekat pegunungan, dimana tanah pegunungan seolah longsor karena air hujan lalu ikut terbawa air ke daratan yang lebih rendah.

d) Banjir Rob

Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh pasangannya air laut. Banjir seperti ini kerap melanda kota di Jakarta. Air laut yang pasang ini umumnya akan menahan air sungai yang sudah menumpuk, akhirnya mampu menjebol tanggul dan menggenangi daratan.

e) Banjir Lahar Dingin

Banjir jenis ini biasanya hanya terjadi ketika erupsi gunung berapi. Erupsi ini kemudian mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan mengalir ke daratan yang ada di bawahnya. Lahar dingin ini mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga air sungai akan mudah meluap dan dapat meluber ke pemukiman warga.

Menurut Siswoko (2002), faktor penyebab terjadinya banjir adalah curah hujan yang tinggi, terjadinya erosi dan sedimentasi pada tanah, pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai, pendangkalan sungai, tidak berfungsinya saluran pembuangan air, hilangnya lahan terbuka, sarana prasarana yang belum optimal, serta perilaku membuang sampah sembarangan. Sedangkan, dampak yang ditimbulkan dari banjir seperti timbulnya masalah kesehatan, menimbulkan korban jiwa, kesulitan air bersih, rusaknya lahan pertanian, limbah yang tersebar, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan sebagainya.

c. Mitigasi Bencana Banjir

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan, menurut Sofyana (2010), kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir

membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika banjir. Kesuksesan dalam penanganan dan evakuasi ketika banjir sangat bergantung dari kesiapsiagaan masyarakat dan perseorangan itu sendiri.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu fisik dan nonfisik. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan pencegahan melalui tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan 2-3 bulan sebelum musim hujan datang seperti:

1. Membersihkan selokan, got, dan sungai dari sampah dan pasir;
2. Membuat sistem dan tempat pembuangan sampah yang efektif untuk mencegah dibuangnya sampah ke sungai atau selokan;
3. Memperkokoh bantaran sungai dengan menanam pohon dan semak belukar, dan membuat bidang resapan di halaman rumah yang terhubung dengan saluran drainase;
4. Memindahkan rumah, bangunan, dan konstruksi lainnya dari dataran banjir agar dapat dimanfaatkan untuk aliran air sungai;
5. Membuat daerah hijau untuk menyerap air ke dalam tanah;
6. Melakukan koordinasi dengan wilayah lain untuk merencanakan tindakan menghindari banjir;
7. Membentuk dan memperkenalkan sistem peringatan dini dan menyiapkan tempat pengungsian;
8. Penetapan dan pelaksanaan peraturan, sanksi;
9. Pemberian penghargaan mengenai penggunaan lahan, tempat membangun rumah, aturan bangunan; dan
10. Penyediaan informasi, penyuluhan, pelatihan, penyusunan kurikulum pendidikan penanggulangan bencana.

2.5.3 Asesmen

2.5.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi sumber adalah:

1) *Home Visit*

Home visit (kunjungan rumah atau tempat) merupakan salah satu teknik yang digunakan praktikan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah dari Ketua RW dan RT, ibu-ibu TP-PKK, serta beberapa warga di Kelurahan Kebon Jayanti. Hal itu dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terselesaikannya permasalahan terkait penanggulangan bencana melalui kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi

yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan apa saja yang ada disana, sehingga *home visit* yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan penanggulangan bencana di Kelurahan Kebon Jayanti mengenai banjir dan juga praktikan ingin mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.5.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber daya terkait isu masalah Analisis Penanggulangan Bencana yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Mengidentifikasi permasalahan terkait penanggulangan bencana di Kelurahan Kebon Jayanti, adakah bencana yang terjadi di Kelurahan Kebon Jayanti; bagaimana upaya pencegahan, saat bencana, dan pasca bencana yang dilakukan; apa penyebab dan dampak dari adanya banjir; serta apa kebutuhan dan potensi sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi dari pihak Ketua RT/RW, ibu-ibu TP-PKK, dan beberapa warga mengatakan bahwa terdapat permasalahan banjir akibat luapan sungai di Kelurahan Kebon Jayanti. Maka dari itu, saya sebagai praktikan memperoleh informasi lebih lanjut dengan menemui para warga Kelurahan Kebon Jayanti lainnya untuk mengetahui bagaimana banjir dapat terjadi, penyebab, dan dampak dari adanya banjir akibat luapan air sungai. Asesmen untuk menggali informasi dilakukan pada tanggal 10 - 13 April 2023.

a. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat adalah:

1. Terjadinya banjir di Kelurahan Kebon Jayanti

Banjir yang terjadi di Kelurahan Kebon Jayanti merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam dan juga akibat ulah manusia. Di Kelurahan Kebon Jayanti sendiri terjadi pendangkalan sungai yang diakibatkan oleh sedimentasi sehingga terjadi penyempitan sungai yang tentunya bisa berpotensi terjadinya banjir. Hal itu dapat dilihat dari anak Kali Cibeunying yang melintasi sepanjang RW 13. Berdasarkan data yang telah didapatkan di lapangan, banjir di Kelurahan Kebon Jayanti terjadi di musim hujan biasanya terletak di RW 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 yang diakibatkan oleh pendangkalan gorong-gorong dan banyaknya sampah yang masuk ke

selokan sehingga air meluap keluar menggenangi jalan-jalan dan gang-gang di sekitar. Adanya banjir tentu menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk pengendalian banjir di lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan luapan air.

2. Ancaman kebakaran tinggi di permukiman padat penduduk

Kebakaran di permukiman seringkali terjadi di wilayah perkotaan yang padat penduduk, padat bangunan, dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Hal itu menjadi faktor utama yang membuat api cepat menjalar. Sementara itu, petugas kerap kesulitan untuk mencapai akses sampai ke lokasi kebakaran. Dikarenakan seringkali bila kebakaran terjadi di tengah permukiman, mobil unit pemadam kebakaran hanya bisa sampai ke pinggir jalan besar, sehingga petugas harus membawa pompa *portable* maupun mengulur selang begitu panjang. Kebakaran ini dapat mengakibatkan dampak kerugian yang besar serta mengancam kehidupan masyarakat.

3. Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Berdasarkan wawancara di lapangan, Kelurahan Kebon Jayanti pernah mengalami kejadian ini, diantaranya seperti wabah penyakit diare, malaria, dan juga pandemi COVID-19. Beberapa disebabkan karena akses dari faktor lingkungan sekitar seperti kepadatan penduduk, sanitasi, pola hidup bersih dan sehat yang belum optimal.

4. Terjadinya gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi selalu datang tanpa melihat waktu dan tempat. Di Kelurahan Kebon Jayanti ini juga pernah terjadi peristiwa gempa bumi. Walaupun tidak cukup besar, namun tetap saja membuat sebagian masyarakat panik. Seharusnya, ketika terjadi gempa bumi dan posisi berada di dalam rumah tidak perlu panik. Namun, dapat menyelamatkan diri dengan bersembunyi di bawah meja atau mencari tempat yang cukup aman untuk menghindari jika terjadi runtuh. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan, siap tanggap, dan penanganan saat terjadi bencana.

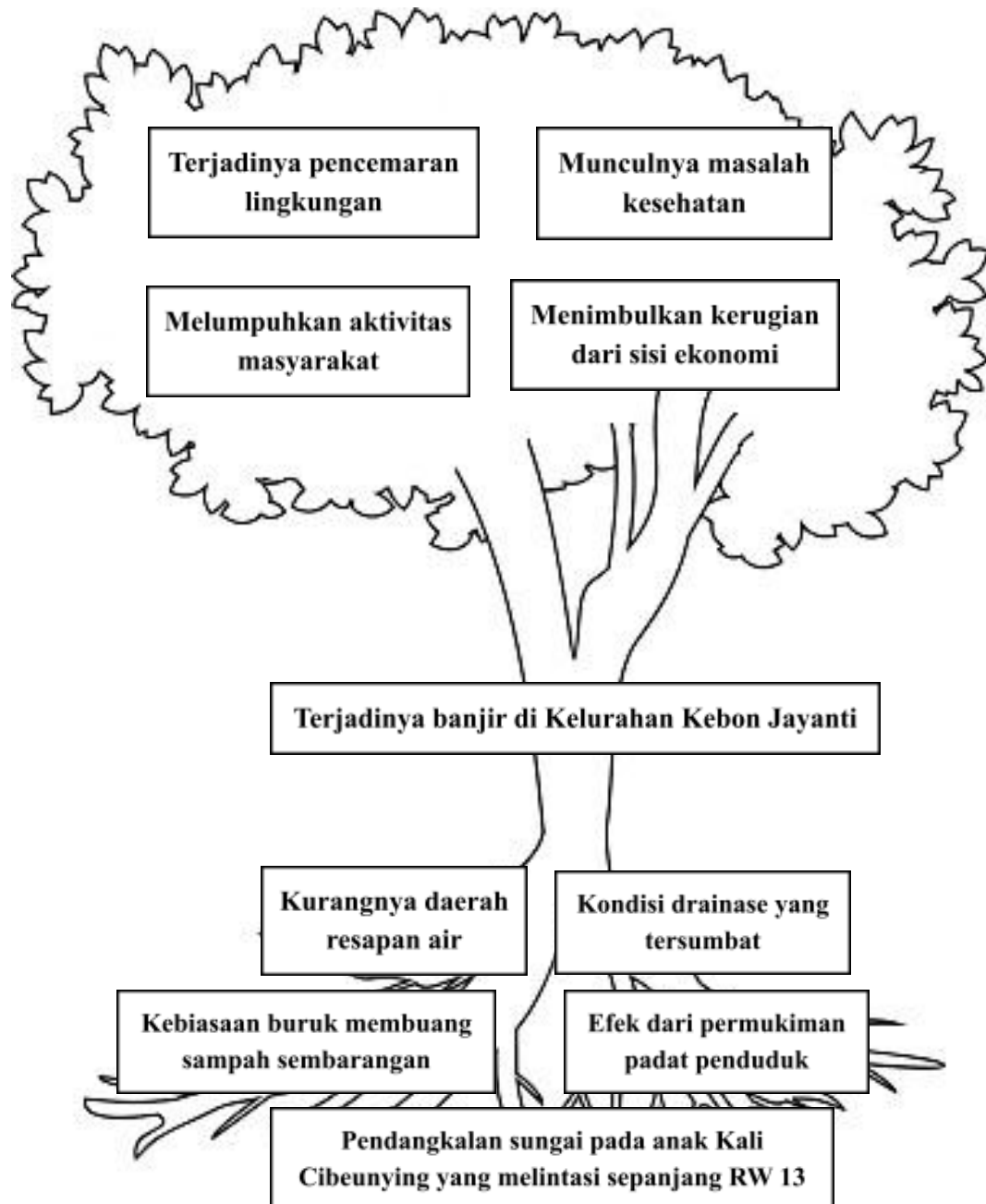
1) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dituliskan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan yaitu terjadinya banjir di Kelurahan Kebon Jayanti.

2) Analisis Pohon Masalah

Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari permasalahan terkait terjadinya banjir di Kelurahan Kebon Jayanti.

Gambar 5.1 Analisis pohon masalah analisis penanggulangan bencana



3) Penyebab Masalah

Penyebab dari permasalahan penanggulangan bencana khususnya pada terjadinya banjir di Kelurahan Kebon Jayanti disebabkan oleh:

- a. Pendangkalan sungai pada anak Kali Cibeunying yang melintasi sepanjang RW 13

Pendangkalan sungai adalah proses pengendapan material-material padat yang terbawa oleh arus sungai, material tersebut dapat berupa sampah, pasir, dan material-material lainnya. Pendangkalan sungai disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembuangan sampah rumah tangga di sungai, erosi berlebihan di daerah hulu, dan sampah ranting pohon. Pendangkalan ini memicu terjadinya banjir seperti yang terjadi di Kelurahan Kebon Jayanti khususnya RW 13 yang merupakan lintasan dari anak Kali Cibeunying. Akibat adanya banjir dapat menyebabkan banyak kerugian dan kerusakan yang dialami oleh masyarakat.

- b. Efek dari pemukiman padat penduduk

Terjadinya banjir dengan permukiman padat penduduk saling berhubungan terkait ketersediaan lahan yang ada. Penduduk dengan jumlah padat biasanya akan mengakibatkan rumah penduduk yang berhimpitan tanpa memikirkan resapan air tanahnya. Tidak hanya itu, kepadatan penduduk cenderung berdampak pada permukiman yang tidak ramah lingkungan. Kesemuanya ini diperparah dengan adanya perilaku sebagian penduduk yang membuang sampah sembarangan, padahal selain merusak habitat lingkungan, membuang sampah sembarangan membuat pendangkalan sungai semakin cepat dan menyebabkan terjadinya banjir.

- c. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan

Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya akan menutup jalannya air yang mengakibatkan aliran air dapat tersumbat. Akibatnya, air akan meluap sehingga menyebabkan banjir. Menghilangkan kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan memang harus dimulai dari diri sendiri dengan selalu membuang sampah bekas pada tempatnya. Dikarenakan selain menjadi sumber penyakit dan penyebab banjir buang sampah sembarangan juga bisa menimbulkan dampak buruk pada aspek lainnya.

- d. Kurangnya daerah resapan air

Daerah resapan air merupakan hal yang sangat penting yang bahkan harus ada di setiap wilayah. Daerah resapan air adalah daerah yang menjadi tempat air hujan dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan terkunci di dalamnya, sehingga tidak langsung mengalir ke sungai atau ke laut. Daerah resapan air akan dapat mencegah terjadinya banjir dan juga dapat menyimpan air dan menguncinya untuk bisa digunakan di kemudian hari. Dengan tidak adanya daerah resapan air dapat menyebabkan berbagai hal yang tidak diinginkan akan mudah terjadi seperti terjadinya banjir diakibatkan air meluap karena tidak ada yang menampung dan juga kekeringan.

- e. Kondisi drainase terganggu

Sistem drainase memainkan peranan penting sebagai saluran air yang mengalirkan air hujan dengan baik sehingga tidak menimbulkan luapan dan

genangan di permukiman, jalan, dan lingkungan warga. Sistem drainase ini harus dijaga dengan baik, terbebas dari berbagai macam sampah dan limbah yang menyumbat dan menghalangi aliran air. Dalam hal ini, masyarakat perlu menerapkan sikap yang baik dalam mengelola sampah dan limbah. Setidaknya, tidak membuang sampah dan limbah di sembarang tempat. Sebab, hal ini sangat membantu meminimalisir risiko terjadinya banjir beserta dampak yang ditimbulkan.

4) Dampak Masalah

Permasalahan terkait dengan penanggulangan bencana khususnya pada terjadinya banjir di Kelurahan Kebon Jayanti dapat menimbulkan dampak seperti berikut:

a. Terjadinya pencemaran lingkungan

Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan tentu hal ini akan mencemari lingkungan. Semakin deras hujan turun maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan dapat menjadi longsor. Oleh karena itu, perlu adanya minimalisir untuk mencegah terjadinya banjir.

b. Munculnya masalah kesehatan

Jika terjadi luapan air akibat banjir akan membuat lingkungan kotor dan tidak sedikit sampah yang tergenang. Hal itu tentunya akan membawa berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakat dapat terganggu. Penyakit yang ditimbulkan bisa berupa diare, demam tifoid, demam berdarah, leptospirosis, dan sebagainya.

c. Melumpuhkan aktivitas masyarakat

Tergenangnya permukiman karena luapan air akibat banjir mengharuskan masyarakat untuk menangani air tersebut agar surut kembali. Hal itu menyebabkan aktivitas harian masyarakat dapat terganggu. Dimana, yang seharusnya masyarakat itu bepergian menjadi terhambat karena harus mengatasi luapan air, menyelamatkan barang berharganya, akses jalan yang tertutup, dan sebagainya.

d. Menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi

Dalam hal ini, banjir dapat mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan terhambat untuk melakukan aktivitas baik itu bekerja, berjualan, atau yang lainnya selama banjir terjadi. Hal ini tentu membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penyelesaian permasalahan tersebut adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian masalah terjadinya banjir di Kelurahan Kebon Jayanti adalah sebagai berikut:

1. Sistem Sumber Formal:

a. Kelurahan Kebon Jayanti

Kelurahan Kebon Jayanti disini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, serta lingkungan hidup dalam satu wilayah. Oleh karena itu, Kelurahan Kebon Jayanti berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang penanggulangan kebencanaan bersama dengan *stakeholder* terkait. Dalam pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan Kelurahan Kebon Jayanti ini berperan sebagai sistem pendukung dan pengawas program.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terencana, terkoordinir dan terpadu. Dalam pelaksanaan intervensi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai pelaksana program, narasumber, dan pengawas kegiatan.

2. Sistem Sumber Informal:

a. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun informal. Oleh karena itu, tokoh masyarakat dianggap perlu untuk berpartisipasi dalam upaya penyelesaian masalah banjir di Kelurahan Kebon Jayanti.

3. Sistem Sumber Kemasyarakatan:

a. Karang Taruna

Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan karang taruna akan berperan sebagai agen perubahan dan pelaksana kegiatan.

b. Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, Tim Penggerak - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dianggap perlu menjadi salah satu potensi dan sumber dalam proses intervensi agar berpartisipasi sebagai agen perubahan dan pelaksana kegiatan.

2.5.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Tetapi di Indonesia penyelenggaraan penanggulangan bencana hanya berfokus pada tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana saja, sehingga tahap pencegahan dan mitigasi bencana masih diabaikan. Kesadaran akan pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana masih kurang baik dari pemerintah maupun masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat itu sendiri yang sangat penting dalam mencegah terjadinya suatu bencana. Dikarenakan di Kelurahan Kebon Jayanti ini memiliki ancaman bencana banjir, maka praktikan akan membentuk sebuah program yaitu kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana banjir khususnya di Kelurahan Kebon Jayanti.

2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana banjir;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana banjir;
- c. Meningkatkan wawasan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kelurahan Kebon Jayanti.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir akan dilaksanakan dalam bentuk penguatan kelembagaan,

pemberian bimbingan, penyuluhan dan demonstrasi kepada masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti mengenai:

1. Pengetahuan umum mengenai bencana banjir;
2. Wawasan tentang penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kebon Jayanti;
3. Hal yang harus dilakukan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan merupakan pihak-pihak yang akan ikut serta dalam penyelenggaraan program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir. Sistem partisipan ini terdiri dari sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengawas, sistem pelaksana, sistem target, dan sistem aksi. Sistem partisipan terdiri dari pihak-pihak yang sudah teridentifikasi sebagai potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam penyelenggaraan program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir, telah ditentukan sistem partisipan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Sistem partisipan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	a. Praktikan b. Tokoh Masyarakat
2.	<i>Change Agent System</i>	a. Karang Taruna b. TP-PKK
3.	<i>Client System</i>	Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti
4.	<i>Support System</i>	Kelurahan Kebon Jayanti
5.	<i>Controlling System</i>	a. Kelurahan Kebon Jayanti b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
6.	<i>Implementing System</i>	a. Karang Taruna b. TP-PKK c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7.	<i>Target System</i>	Masyarakat Kelurahan Kebon

		Jayanti
8.	<i>Action System</i>	a. Karang Taruna b. TP-PKK

e. Metode dan Teknik

1) Metode

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau “*community organization dan community development*”. Metode ini digunakan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik dan secara lebih mandiri. Dalam program ini metode CO/CD digunakan agar masyarakat mampu mengartikulasikan masalah-masalahnya, memahami dan menerapkan mitigasi bencana banjir dengan baik dan benar.

2) Teknik

a. Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, dan edukasi baik secara lisan maupun tulisan. Teknik yang digunakan dalam program ini adalah teknik penyuluhan sosial dimana para sasaran dalam hal ini masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti, karang taruna, dan juga Tim Penggerak - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) akan diberi pemahaman, edukasi, dan motivasi terkait mitigasi bencana banjir.

b. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan penerima manfaat yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber, dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Teknik ini digunakan dalam tahap pasca program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir untuk mendukung masyarakat yang telah diberikan sosialisasi agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan sebelumnya.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Rencana Anggaran Biaya

Dalam pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dibutuhkannya anggaran dana untuk merealisasikan program dan penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam kegiatannya. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Rencana anggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 Rencana anggaran kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir

No.	Kegiatan	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Persiapan	ATK	5 paket	Rp 5.000	Rp 25.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Kertas HVS	1 rim	Rp 41.000	Rp 41.000
		Snack	10 box	Rp 5.000	Rp 50.000
		Jumlah			
2.	Pelaksanaan	ATK	30 paket	Rp 5.000	Rp 150.000
		Leaflet	30 bendel	Rp 1.000	Rp 30.000
		<i>Sound System</i>	1 set	Rp 150.000	Rp 150.000
		Proyektor	1 set	Rp 100.000	Rp 100.000
		Spanduk	1 lembar	Rp 36.000	Rp 36.000
		Snack	42 box	Rp 5.000	Rp 210.000
		Makan	42 box	Rp 10.000	Rp 420.000
		Alat Peraga	1 set	Rp 200.000	Rp 200.000
		Honor Pematari	2 orang	Rp1.000.000	Rp2.000.000
		Jumlah			
3.	Pasca Pelaksanaan	ATK	5 paket	Rp 5.000	Rp 25.000
		Kertas Plano	5 lembar	Rp 700	Rp 3.500
		Snack	10 box	Rp 5.000	Rp 50.000

		Jumlah	Rp 78.500
4.	Dana Darurat		Rp 150.000
JUMLAH			Rp3.644.000

2) Alat yang Dibutuhkan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir memerlukan sejumlah alat dan bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Berikut rincian alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

Tabel 5.3 Daftar alat dan bahan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir

Daftar Peralatan	Daftar Bahan
Laptop	Kertas Plano
Proyektor	Kertas HVS
<i>Sound System</i>	Alat Tulis
Printer	Tinta Printer
Meja	Taplak Meja
Kursi	
Alat Peraga Kebencanaan	

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu program. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT yang praktikan gunakan untuk menguji kelayakan dari kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.

Dengan menggunakan Analisis SWOT praktikan dapat menyusun strategi untuk memperoleh alternatif ofensif menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan (*weakness*) untuk mengurangi ancaman (*threats*),

mengurangi ancaman (*threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*strength*), dan menopang kelemahan (*weakness*) untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*). Adapun hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4 Analisis SWOT kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program dapat mencegah potensi bencana yang akan terjadi; 2. Program mitigasi bencana banjir mudah dilakukan jika penataan lingkungan sekitarnya sudah baik dan benar. 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program tidak dapat dilakukan hanya sekali pertemuan saja. 2. Program harus dilakukan dengan demonstrasi supaya masyarakat lebih paham.
<p style="text-align: center;">Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya <i>stakeholder</i> yang dapat dijadikan narasumber yaitu BPBD; 2. Adanya dukungan dari Kelurahan untuk mengadakan kegiatan. 	<p style="text-align: center;">Strategi (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi panitia dengan <i>stakeholder</i> yang mendukung kegiatan; 2. Melakukan kegiatan secara efektif; 3. Pengembangan sarana dan prasarana serta penyediaan berbagai fasilitas penunjang. 	<p style="text-align: center;">Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk membantu penyebaran informasi; 2. Meminta bantuan pengadaan sarana dan prasarana kepada <i>stakeholder</i>; 3. Melakukan pelatihan untuk karang taruna dan TP-PKK agar nantinya mereka yang akan mensosialisasikan kepada setiap masyarakat.
<p style="text-align: center;">Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat tidak tertarik dengan kegiatan penyuluhan; 2. Materi sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik; 3. Materi penyuluhan tidak diterapkan oleh masyarakat. 	<p style="text-align: center;">Strategi (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun materi yang menarik dan mudah dipahami oleh semua kalangan; 2. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan masyarakat; 3. Memberikan demonstrasi yang mudah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat. 	<p style="text-align: center;">Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan semua panitia dan <i>stakeholder</i> untuk menyebarkan informasi kegiatan; 2. Menyebarkan poster mitigasi bencana banjir di seluruh kelurahan; 3. Membagikan leaflet mitigasi bencana banjir kepada masyarakat.

h. Indikator Keberhasilan

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir adalah:

- 1) Masyarakat paham tentang penanggulangan bencana banjir;
- 2) Masyarakat mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana banjir; dan
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kelurahan Kebon Jayanti.

i. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Jadwal

Berikut ini adalah susunan acara dalam tahap pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir. Kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.

Tabel 5.5 Jadwal kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	08.00 - 08.15	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Kelurahan Kebon Jayanti
2.	08.15 - 09.45	Pemaparan Materi 1	Sie. Acara	Wawasan Terkait Bencana Banjir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
3.	09.45 - 10.00	<i>Ice Breaking</i>	Sie. Acara	<i>Games</i>	Sie. Acara
4.	10.00 - 11.30	Pemaparan Materi 2	Sie. Acara	Mitigasi Bencana Banjir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
5.	11.30 - 12.30	ISHOMA	Sie. Konsumsi		
6.	12.30 - 14.00	Pemaparan Materi 3	Sie. Acara	Hal yang dilakukan saat pra bencana, tanggap darurat, dan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

				pasca bencana	
7.	14.00 - 15.00	Demonstrasi dan praktik	Semua Panitia	Demonstrasi dan Praktik	a. BPBD b. Karang Taruna c. TP-PKK
8.	15.00 - 15.15	Penutup	Sie.Acara	Foto Bersama	-

2) Langkah-Langkah

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir:

a. Pra Sosialisasi

Tahap pra sosialisasi ini dilakukan selama 1 hari untuk mempersiapkan kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah:

1. Membentuk tim kerja;
2. Mengidentifikasi peserta kegiatan;
3. Mengidentifikasi narasumber;
4. Menyusun materi kegiatan;
5. Menentukan lokasi kegiatan;
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana.

b. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dilaksanakan selama 1 hari yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti terkait mitigasi bencana banjir. Dimana, dalam tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan seperti:

1. Pembukaan;
2. Pemaparan materi;
3. *Games* atau *ice breaking*;
4. Demonstrasi dan praktik pengelolaan dan pemeliharaan;
5. Penutup.

c. Pasca Sosialisasi

Tahap pasca kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dilaksanakan selama 1 hari, dimana dalam tahap ini akan dilakukan kegiatan seperti:

1. Pendampingan masyarakat;
2. Evaluasi kegiatan;
3. Menyusun laporan kegiatan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Praktikum I merupakan praktikum berbasis laboratorium. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial dan memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial yang meliputi pendekatan awal, asesmen dan perencanaan intervensi.

Praktikan ditempatkan di beberapa kelurahan Kota Bandung, dimana kelompok kami mendapatkan Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan praktikum dimulai pada tanggal 25 Januari 2023. Dimulai dengan kegiatan pembekalan umum dari Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktorat Pemberdayaan Sosial. Tahap selanjutnya Praktikan menerima berbagai pembekalan yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu analisis jaminan sosial, analisis sumber dana bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan dan analisis penanggulangan bencana. Setiap profilnya praktikan diwajibkan untuk mencari isu-isu yang sesuai dengan topik profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data sekunder. Kemudian dilakukan asesmen dan menyusun rencana intervensi dari isu yang dipilih.

Praktik Profil Analisis Jaminan Sosial dimulai pada tanggal 2 Februari 2023, diawali dengan pembekalan dari praktisi oleh Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE., selaku Perencana Ahli Muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas dan Tim Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial. Dalam Profil Analisis Jaminan Sosial, praktikan memilih isu terkait dengan BPJS Kesehatan Non-PBI atau mandiri. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan BPJS Kesehatan Non-PBI atau mandiri, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Jaminan Sosial praktikan menjadikan pekerja sektor informal yang terdaftar BPJS Kesehatan Non-PBI atau mandiri tetapi telat melakukan pembayaran iuran sehingga menyebabkan tunggakan tagihan sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen praktikan menyusun rencana intervensi berupa kegiatan sosialisasi, yaitu program peningkatan sosialisasi peningkatan kesadaran peserta menunggak untuk berpartisipasi dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Praktik Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial dimulai pada tanggal 22 Februari 2023. Diawali dengan pembekalan dari praktisi oleh Bapak Tonton Heriyanto selaku *CSR Manager* PT. AAPC Indonesia dan Tim Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial. Dalam Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial praktikan mengambil isu terkait jaminan sosial berbasis masyarakat. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan jaminan sosial masyarakat, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan mengambil pengelolaan iuran dana santunan kesehatan yang belum optimal sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen praktikan menyusun rencana intervensi berupa kegiatan sosialisasi, yaitu sosialisasi terkait standar, etika, cara penggalangan dana santunan kesehatan serta pelatihan pembuatan kartu iuran warga.

Praktik Profil Analisis Pemberdayaan Sosial dimulai pada tanggal 8 Maret 2023, diawali dengan pembekalan dari praktisi oleh Bapak Samsul Maarif selaku *Project Manager* Yayasan Usaha Mulia dan Tim Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial. Dalam profil pemberdayaan sosial, praktikan mengambil isu terkait pengangguran tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan pengangguran, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Pemberdayaan Sosial praktikan mengambil permasalahan terkait pengangguran di Kelurahan Kebon Jayanti sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa kegiatan peningkatan kapasitas melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

Praktik Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial dimulai pada tanggal 24 Maret 2023, diawali dengan pembekalan dari praktisi oleh Bapak Ade Reno Sudiarno, AKS, MSW., selaku *Deputy 1 CEO Islamic Relief* Indonesia dan Tim Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial. Dalam profil penataan lingkungan sosial praktikan mengambil isu terkait pengelolaan sampah. tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan pengelolaan sampah, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial praktikan mengambil pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan dengan optima sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa penyuluhan terkait bank sampah.

Praktik Profil Analisis Penanggulangan Bencana dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023. Diawali dengan pembekalan dari praktisi oleh Bapak Mohd Robi Amri selaku Perencana Ahli Madya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta dan Tim Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial. Dalam profil analisis penanggulangan bencana, praktikan mengambil isu terkait bencana banjir. tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan bencana banjir, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analisis Penanggulangan Bencana praktikan mengambil banjir akibat luapan air sungai sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan mitigasi bencana banjir.

3.2 Rekomendasi

3.2.1 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Setelah pelaksanaan praktikum laboratorium yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari sampai 15 April 2023. Maka praktikan merasa memiliki beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ataupun ditingkatkan oleh pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial. Berikut ini adalah rekomendasi yang sekiranya dapat dipertimbangkan oleh Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial:

1. Pihak Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial diharapkan mengkaji ulang pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran kelas;
2. Pihak Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial diharapkan mengkaji ulang substansi pembekalan agar lebih relevan dengan profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial.

3.2.2 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

1. Pihak kampus diharapkan meningkatkan kerjasama untuk mengadakan laboratorium lapangan untuk praktikum;
2. Pihak kampus diharapkan untuk mengoptimalkan penggunaan *e-learning*, sebagai sarana pembelajaran mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hamid. (2003). Galang Dana Ala Media. Jakarta: Yayasan Pirac.
- Ahmad, A. (2014). Balai Latihan Kerja Industri Studi Tentang Peran Balai Latihan Kerja Industri Samarinda dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Pelatihan Kerja Industri. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2 (1): 2074-2085.
- Amir, HT. (2007). Pengembangan Program Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Instruktur dan Pengembangan Surabaya. *Jurnal Balitbang Jawa timur*, cakrawala edisi I, bulan ke-6.
- Arifin, S. R., & Wisudanto. (2017). *Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur. *In University Network for Indonesia Infrastructure Development (Issue September)*.
- Asdak, C. (2010). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asteria D. & Heruman H. (2016). Bank Sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah.
- Astutik, Budi. (2006). Pelaksanaan Program Pelatihan Montir Sepeda Motor Bagi Anak Putus Sekolah di BLK Boyolali. Semarang: Skripsi UNNES.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). Laporan Pusdalops. Jakarta: BNPB.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (2014). Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS.
- BAKORNAS PBP. (2007). Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia. Jakarta : Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- Erlinda. (2010). Strategi Pengembangan Balai Latihan Kerja Sumatera Barat. Tesis Pasca Sarjana: Universitas Andalas.
- Gilarso. (2004). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran. Jakarta: Binus University.
- Gunawan, Gugun. (2007). Mengolah Sampah Menjadi Uang. Jakarta : Transmedia, cet. 1, hlm. 4.
- Handoko. (1993). Faktor Penentu Pengangguran di Indonesia.

- Irfan, M. (2016). *Crowdfunding* Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan. *Share: Social Work Journal*, 6(1).
- Iryanti, Rahma. (2009). Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui BLK.
- Jatimtimes.com. (2021). Penggalangan Dana Harus Ada Izin, Begini Prosedur Permohonannya.
- K, Klein. (2007). *Fundraising for Social Change*. San Francisco: *Jossey Bass*, 5th ed. K, Muhsin. (2012). *Fundraising* : Taman Baca Masyarakat. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Kemendes RI. (2016). Sudah Siapkah Kita Menghadapi Banjir? Buku Penanggulangan Pusat Krisis Kesehatan. Jakarta: Kemendes RI.
- Kementerian Kesehatan. (2013). Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kusminah, I. L. (2018). Penyuluhan 4r (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) dan Kegunaan Bank Sampah Sebagai Langkah Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Ekonomis di Desa Mojowuku Kabupaten Gresik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat LPPM Untag Surabaya*, Vol. 03, No. 01, hal 22–28.
- Lestari, L. P., Afifah, Y. N., G, B. P., Lestariningsih, W., Asri Dwi Puspita, E. G., & Choifin, M. (2020). Pengelolaan Metode 4R dan Bank Sampah Untuk Menjadikan Lingkungan Bersih, Sehat dan Ekonomis. *Among Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02, Nomor 01.
- Ligal, Sebastian. (2008). Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. *Jurnal Dinamika Teknik Sipil*.
- Maryono, Agus. (2005). *Menangani Banjir, Kekeringan, Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad, Syafii. (2017). Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016.
- Paimin, Sukresno. (2009) . *Teknik Mitigasi Banjir Dan Tanah Longsor*. Tropenbos International Indonesia Programme: ISBN.
- Peraturan Kepala BNPB No. 8 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja.
- Pribadi,S, Krishna. (2008). Pendidikan Siaga Bencana. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana ITB.
- Purwanti W. S., Sumartono., & Haryono B. S. (2015). Perencanaan Bank Sampah dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, Vol 5 No. 1.
- Rahayu, CC. (2013). Penggalangan Dana Model *Crowdfunding* Di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahayu, dkk. (2009). Banjir dan Upaya Penanggulungannya. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana (PMB-ITB).
- Rahayu, Harkunti P. (2009). Banjir dan Upaya Penanggulungannya. Bandung: Promise Indonesia.
- Rosalina, Handojo, A., & Wibowo, A. (2012). Aplikasi *Crowdfunding* Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis *Website* dan *Facebook Application*. *Jurnal Infra. Komputer*, 2 (Jaringan Komputer) 1-5. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Rusilowati, Ani; Supriyadi; Binadja, Achmad; Mulyani, Sri, E S. (2010). Mitigasi bencana alam berbasis pembelajaran kebencanaan alam bervisi *science environment technology and society* terintegrasi dalam beberapa mata pelajaran. UNNES.
- Siswoko. (2002). Banjir, Masalah Banjir dan Upaya Mengatasinya. Jakarta: Himpunan Ahli Teknik Hidraulika Indonesia (HATHI).
- Slideshare.net. (2018). Praktik Penggalangan Dana Publik Kajian Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.
- Tasrial. (1998). Sampah dan Pengelolaannya. PPPGT / VEDC. Malang.
- Thabrany, H. (2014). Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Tim Penulis PS. (2008). *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).
- Wardi, I. N. (2011). Pengelolaan sampah berbasis sosial budaya: Upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 11(1), 167-177.
- Waruwu, H. (2007). Pengelolaan Sampah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya*, 1(2), 159-167.
- Yayasan IDEP. (2007). *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Yayasan IDEP.
- YLKI. (2015). *Mengupas Transparansi Penggalangan Dana Publik*.

LAMPIRAN 1

RESUME PEMBEKALAN

JAMINAN SOSIAL

A. Konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Di Indonesia

1. Landasan Filosofis

- a) Hak Konstitusional : setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3));
- b) Setiap Orang Berkembang Secara Utuh : memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. (UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3));
- c) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Layak : terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (3));
- d) Wujud Tanggung Jawab Negara : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2));
- e) Asas Kemanusiaan dan Martabat Manusia : berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (2)).

2. Pengertian dan Tujuan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan suatu cara penyelenggaraan program jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Sedangkan asuransi sosial merupakan suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Adapun tujuan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena:

- a) Menderita sakit;
- b) Mengalami kecelakaan kerja;
- c) Memasuki usia lanjut/pensiun;
- d) Meninggal dunia; atau
- e) Kehilangan pekerjaan.

B. Program Jaminan Sosial Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Di Indonesia

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dimana terdapat 2 (dua) skema dari pelaksanaan jaminan sosial, yaitu:

1. Skema Penerima Bantuan Iuran (*Non-Contributory*)

Adapun persyaratannya seperti berikut ini.

- a) Diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- b) Iuran dibayarkan oleh Pemerintah;
- c) Bagi peserta yang sudah tidak menjadi fakir miskin dan sudah mampu wajib menjadi peserta jaminan Kesehatan dengan membayar iuran (*contributory*).

2. Skema Non-Penerima Bantuan Iuran (*Contributory*)

Adapun persyaratannya seperti berikut ini.

- a) Dibedakan menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP);
- b) Iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja dan dibayarkan secara teratur oleh pemberi kerja;
- c) Iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP) dibayarkan secara mandiri oleh pekerja;
- d) Jenis dari skema non-penerima bantuan iuran (*contributory*) ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

C. Kelembagaan Utama Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia

Adapun kelembagaan utama yang berperan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia adalah:

1. Regulator yang bertugas menyusun kebijakan dan program. Lembaga yang dimaksud seperti Kemenkes, Kemensos, Bappenas, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Kemenaker. Dalam hal ini, regulator menetapkan target, sinkronisasi dan memadankan data, serta melaksanakan monev kepada operator.
2. Operator disini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dimana, BPJS Kesehatan bertugas untuk mendaftarkan peserta, melakukan pembayaran klaim (kapitasi/INA CBGs), melakukan kredensialing. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk menagihkan klaim, membayar klaim kepada faskes (JKK), dan membayarkan klaim kepada peserta (JKK, JKM, JHT, JP).
3. Fasilitas Kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta.
4. Peserta berhak untuk mendaftar kepada BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan, melaporkan perubahan data administrasi, mengajukan klaim atau komplain kepada BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan.

5. Pengawas disini adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan pengawasan eksternal, menetapkan indikator kinerja.
6. Pemerintah Daerah yang bertugas untuk melakukan akreditasi terhadap Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS, Klinik).

D. Kebijakan dan Penguatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga dan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (JKN) dan jaminan sosial ketenagakerjaan, contohnya melalui kebijakan afirmasi perlindungan tenaga pendidik, penerima kredit usaha, profesi, dan segala upaya dukungan sampai tingkat pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pekerja terlindungi.

SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL

A. Konsep Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial) Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. (Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial) Jenis bantuan sosial:

1. Bantuan langsung : tunai, barang, makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya.
2. Penyediaan aksesibilitas : perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar, penyediaan pemakaman, dan lainnya.
3. Penguatan kelembagaan : bimbingan teknis dan supervisi.

Sumber dana bantuan sosial ini berasal dari:

1. Masyarakat, berasal dari kedermawanan seseorang dan atau lembaga sosial, dana sumbangan dari proses penggalangan dana, pengumpulan dana berdasarkan kearifan lokal;
2. Hibah, dana yang diberikan dari bantuan/hibah luar negeri dan pihak perusahaan swasta (CSR);
3. Negara, dana yang berasal dari APBN dan APBD;

4. Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB), pajak penyelenggaraan UGB (10%), hadiah yang tidak tertebak atau tidak diambil pemenang.

B. Landasan Hukum Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
6. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dalam Bentuk Uang.

C. Penggalangan Dana

Penggalangan dana melalui media sosial sekarang sedang populer karena mudah dan lebih efisien dalam menyentuh haru publik asalkan proposal yang diajukan menarik. Tetapi dalam penggalangan dana di media sosial kerap kali memperlihatkan privasi korban sasaran. Prinsip yang harus dilakukan dalam penggalangan dana adalah:

1. Memberi orang untuk menolong orang;
2. Memberi bantuan sesuai kemampuan;
3. Adanya model/ccontoh dalam organisasi;
4. Membina hubungan baik dengan donatur;
5. Memiliki cara sukses untuk menggalang dana:
 - a) Memilih donatur yang tepat;
 - b) Memiliki cara yang tepat dan benar;
 - c) Memiliki waktu yang tepat;
 - d) Memiliki program yang tepat.

Adapun standar etika dalam penggalangan dana adalah:

1. Adanya surat izin dari pemerintah;
2. Tidak mengandung unsur paksaan;
3. Tidak mengganggu kegiatan publik;
4. Rekening bukan milik pribadi/perusahaan.

Adapun persyaratan pengajuan izin untuk menggalang dana adalah:

1. Mempunyai akta notaris/akta pendirian/ anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. Sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar dalam instansi sosial setempat;
3. Telah melaksanakan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial minimal 1 tahun;

4. Mempunyai kepanitiaan yang meliputi: pengurus kepanitiaan, alamat kepanitiaan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi beberapa permasalahan terkait penggalangan dana bantuan sosial, seperti:

1. Tujuan tidak jelas;
2. Tidak berizin;
3. Masih menggunakan rekening pribadi;
4. Tidak merencanakan dengan baik;
5. Tidak melakukan pelaporan;
6. Penyaluran tidak transparan;
7. Penyelewengan peruntukan bantuan sosial;
8. Pemotongan dana bantuan;
9. Alokasi dana lebih dari biaya operasional;
10. Struktur organisasi tidak jelas;
11. Donatur sulit mengakses pemanfaatan dana;
12. Tidak memiliki bukti pencapaian tujuan.

D. Permasalahan Dalam Bermitra

Pekerja sosial harus berada di bawah payung yayasan supaya perusahaan lebih percaya untuk bermitra. Karena di masa sekarang adalah bukan lagi masa untuk mencari dana tetapi mencari mitra. Selain dengan perusahaan (CSR) pekerja sosial dapat bermitra dengan mitra luar negeri atau mitra sosial seperti Kitabisa.com. Masalah yang sering terjadi dalam bermitra:

1. Kesalahan pola pikir kita terhadap sumber dana bantuan sosial, yang kita pikir mudah untuk mendapatkannya;
2. Sulitnya mendapat kepercayaan dari mitra, karena proposal yang diajukan tidak menarik;
3. Masalah pelaporan penggunaan dana bantuan sosial.

PEMBERDAYAAN SOSIAL

A. Konsep Pemberdayaan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial sebagai upaya untuk mencapai kondisi yang diinginkan (*expected condition*). Inti dari pemberdayaan sendiri adalah:

1. Proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik;
2. Menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* bisa diwujudkan;

3. Proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*);
4. Menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Aktor-aktor yang berperan dalam program pemberdayaan adalah:

1. Pemerintah;
2. NGO;
3. Sektor Swasta;
4. Individu; dan
5. Masyarakat itu sendiri.

B. Pendekatan Pemberdayaan

1. Pendekatan Direktif (Non-Instruktif)
 - a) *Community worker* sudah tahu apa yang baik dan dibutuhkan masyarakat;
 - b) Prakarsa dan keputusan ada ditangan *community worker*;
 - c) Hasil yang didapat lebih bersifat fisik dan jangka pendek;
 - d) Kurang pengalaman belajar bagi masyarakat dan ketergantungan terhadap *community worker*.
2. Pendekatan Non-Direktif (Partisipatif)
 - a) Masyarakat sudah tahu apa yang baik dan dibutuhkan;
 - b) Masyarakat melakukan analisa dan membuat keputusan;
 - c) *Community worker* sebagai katalisator dan enabler;
 - d) *Community worker* mendorong masyarakat untuk *self determination*.

C. Tahapan Pemberdayaan

1. *Assesment*
 - a) Kebutuhan;
 - b) Sumber daya;
 - c) Individual atau kelompok.
2. Perencanaan Alternatif Program
 - a) Melibatkan masyarakat untuk menemukenali masalah dan cara mengatasinya;
 - b) Alternatif program yang dapat dilakukan.
3. Pemformulasian Rencana Aksi
 - a) Tentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan;
 - b) Buat tujuan jangka pendek dan bagaimana cara untuk mencapainya.
4. Implementasi
 - a) Jalankan kegiatan sesuai rencana.
5. Evaluasi
 - a) Indikator keberhasilan, relevansi, keterjangkauan, pemanfaatan, cakupan, kualitas, upaya dan efisiensi.

6. Terminasi
 - a) Kemandirian masyarakat;
 - b) Jangka waktu;
 - c) Anggaran.

D. Permasalahan dan Solusi Dalam Pemberdayaan

1. Komunikasi dan koordinasi
 - a) Pertemuan rutin;
 - b) Monitoring;
 - c) Membuat media komunikasi bersama.
2. Kurangnya informasi
 - a) Mengumpulkan informasi terkait;
 - b) Sampaikan informasi secara detail dan jelas agar ada persamaan persepsi dan pemahaman.
3. Kurangnya komitmen dari masyarakat
 - a) Kesepakatan;
 - b) Surat kesediaan;
 - c) Ruang partisipasi;
 - d) Penghargaan.
4. Nilai di masyarakat yang kurang mendukung
 - a) Kegiatan raising *awareness*;
 - b) Pendekatan persuasif;
 - c) Bermitra dengan tokoh keagamaan atau tokoh masyarakat.
5. *Exit strategy* dan *sustainability*
 - a) Membangun mindset dan komitmen masyarakat dari awal;
 - b) *Capacity building* untuk masyarakat;
 - c) Advokasi ke *stakeholders* setempat terkait;
 - d) Perencanaan *exit strategy* dari awal;
 - e) Memastikan tujuan utama tercapai – *sustainable impact*
6. Birokrasi yang tidak mendukung
 - a) Kontak beberapa *stakeholders* terkait;
 - b) Penjelasan pentingnya program untuk *stakeholders* terkait.

E. Peran dan Keterampilan yang Dibutuhkan Dalam Pemberdayaan

1. Fasilitatif
 - a) Animasi sosial;
 - b) Mediasi dan negosiasi;
 - c) Pemberi dukungan;
 - d) Membentuk konsensus;
 - e) Fasilitasi kelompok;
 - f) Pemanfaatan sumber daya;
 - g) Keterampilan mengorganisir;
 - h) Komunikasi personal.

2. Edukasional :
 - a) Membangkitkan kesadaran masyarakat;
 - b) Menyampaikan informasi;
 - c) Pelatihan.
3. Representasional :
 - a) Membangkitkan kesadaran masyarakat;
 - b) Menyampaikan informasi;
 - c) Pelatihan.
4. Teknis :
 - a) Keterampilan untuk riset;
 - b) Menggunakan komputer;
 - c) Melakukan presentasi tertulis atau verbal;
 - d) Mengontrol dan mengelola keuangan.

PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL

A. Konsep Penataan Lingkungan

Lingkungan sosial adalah keadaan sosial dan fisik langsung tempat orang menjalani kehidupan atau sesuatu terjadi atau berkembang (Barnett and Casper, 2001). Semua kondisi di dunia yang mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk pertumbuhan dan perkembangan atau proses kehidupan yang dapat dilihat juga sebagai pemberian lingkungan bagi generasi yang lain (Stroz, 1987). Domain pekerjaan sosial adalah pada interaksi dan relasi antara orang dan lingkungan sosial.

Masalah lingkungan adalah masalah sosial juga. Pekerja sosial semakin mengasumsikan pentingnya memasukkan isu-isu lingkungan dalam intervensi sosial. Keterkaitan yang dekat Kepada isu-isu ekologi relevan khususnya ketika menangani masyarakat rentan (Rocha, 2018). Pekerjaan sosial yang memperhatikan aspek lingkungan diasosiasikan dengan berbagai istilah : *green social work* (Dominelli, 2012), *eco-social work* (Peeters, 2012).

Green social work merupakan suatu praktik holistik yang berfokus pada keterhubungan antar orang, organisasi sosial, relasi antara orang dan flora atau fauna dalam habitatnya, dan interaksi antara krisis sosial ekonomi dan lingkungan dan perilaku antar orang yang merusak keberfungsian manusia dan bumi. Tujuan dari *green social work* adalah mereformasi tekanan sosio-ekonomi dan politik yang telah merusak pada kualitas hidup populasi masyarakat miskin dan marjinal, menjamin perubahan dan transformasi sosial guna meningkatkan keberfungsian orang dan bumi hari ini dan masa depan serta meningkatkan tanggung jawab dan hak saling peduli dengan orang lain. Tugas utama dari *green social work* adalah:

1. Menyelesaikan ketidaksamaan distribusi kekuasaan dan sumber daya;
2. Eliminasi kemiskinan dan ketidaksamaan;
3. Mempromosikan saling ketergantungan, solidaritas global;

4. Menggunakan sumber daya alam yang terbatas untuk kemanfaatan semua orang;
5. Melindungi flora dan fauna.

B. Permasalahan Sosial-Ekonomi-Lingkungan

1. Masalah Lingkungan
 - a) Hutan rusak;
 - b) Dampak perubahan iklim;
 - c) Sumber daya laut rusak;
 - d) Eksploitasi sumber daya alam berlebihan dan merusak;
 - e) Konflik pemanfaatan sumber daya.
2. Masalah Sosial-Ekonomi
 - a) Relasi kuasa;
 - b) Keterampilan kerja terbatas;
 - c) Akses terhadap keuangan rendah;
 - d) Akses terhadap pendidikan berkualitas terbatas;
 - e) Ketimpangan gender;
 - f) Kemiskinan;
 - g) Dampak krisis ekonomi;
 - h) Konflik sosial antar suku;
 - i) Pasar tenaga kerja terbatas;
 - j) Kebijakan dan pelayanan publik yang terbatas;
 - k) Infrastruktur tidak memadai;
 - l) Kesenjangan sosial.

C. Tahapan Kerja Bidang Penataan Lingkungan Sosial

1. Identifikasi Masalah;
2. Perencanaan : menggunakan teori perubahan dan kerangka logis;
3. Implementasi : melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pengorganisasian, pengembangan ekonomi, koalisi, dan aksi politik dan sosial;
4. Evaluasi : melalui formatif dan sumatif.

D. Kompetensi yang Dibutuhkan Untuk Praktik Penataan Lingkungan

1. Peran dan kompetensi pekerja sosial
 - a) Peran pekerja sosial : advokasi, inisiasi, *spokes person*, *organizer*, *negotiator*, konsultan, dan mediator.
 - b) Kompetensi pekerja sosial : bekerja dengan koalisi dan advokasi, asesmen kebutuhan, perencanaan, pengembangan organisasi, evaluasi, penggalangan dana, mediasi, dan negosiasi.
 - c) Dilakukan melalui pemberdayaan, pengembangan masyarakat, membangun tim, multi-level *assessment*, intervensi holistik, praktik relasi.
2. Peluang kerja bidang penataan lingkungan sosial
Tujuan pembangunan berkelanjutan melalui rapat umum PBB pada

September 2015 mengadopsi transformasi dunia melalui agenda 2030 pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan dan 169 target. Disini menekankan pada pengurangan kemiskinan dan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang tertinggal adalah prioritas ekonomi global. Hal tersebut juga mengintegrasikan keseimbangan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun peluang kerja profit dan non profit seperti:

- a) *Business Development Manager*;
- b) Program Management;
- c) *Advocacy Advisor*;
- d) *Conflict Resolution Advisor*;
- e) *Monitoring, Evaluation, and Learning Manager*;
- f) *CSR Manager*;
- g) *Government Relation Manager*;
- h) *Consultant*.

PENANGGULANGAN BENCANA

A. Konsepsi Bencana

Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dan rawan bencana. Bencana sering terjadi di berbagai wilayah dengan intensitas dan dampak yang berbeda, tergantung karakteristik wilayah, sosial-ekonomi, tingkat pembangunan, dan tingkat pemicu bencana. Bencana merupakan urusan bersama, perlu dikembangkan kemitraan, sinergitas, dan inklusivitas untuk penanggulangan yang efektif. Sedangkan, hubungan kesejahteraan sosial disini sebagai salah satu disiplin ilmu yang strategis dan dibutuhkan dalam berbagai aspek penanggulangan bencana.

Terdapat rumus untuk menghitung risiko bencana yaitu : $R = (H \times V) / C$ atau Risiko Bencana = (Bahaya x Kerentanan) / Kapasitas. Dalam hal ini kerentanan terjadi karena aspek sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Namun, aspek sosial inilah yang paling mendominasi. Dengan adanya kerentanan menjadi suatu bahaya yang dapat memunculkan risiko bencana hingga menjadi pemicu bencana itu terjadi. Ada 2 (dua) fase dalam siklus bencana yaitu fase penurunan risiko sebelum bencana dan fase pemulihan pasca bencana. Siklus bencana terjadi dimulai dari tindakan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

B. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi menjadi:

1. Pra Bencana
 - a) Situasi tidak ada bencana
 - Perencanaan;
 - Pencegahan;

- Pengurangan risiko;
 - Pendidikan;
 - Pelatihan;
 - Penelitian;
 - Penataan tata ruang.
- b) Situasi terdapat potensi bencana
- Mitigasi;
 - Peringatan dini;
 - Kesiapsiagaan.
2. Saat Tanggap Darurat
- a) Kajian cepat;
 - b) Status keadaan darurat;
 - c) Penyelamatan dan evakuasi;
 - d) Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e) Perlindungan;
 - f) Pemulihan.
3. Pasca Bencana
- a) Rehabilitasi
 - Sarana dan prasarana;
 - Sosial;
 - Ekonomi;
 - Kesehatan.
 - b) Rekonstruksi
 - Keamanan dan ketertiban;
 - Lingkungan.

C. Perspektif Tentang Bencana

1. Pandangan Konvensional

Pandangan konvensional sering disebut juga dengan pandangan fatalistik, dimana bencana dianggap merupakan kodrat atau takdir alam. Terjadinya bencana adalah suatu:

- a) musibah, malapetaka atau kecelakaan;
- b) yang tidak dapat diprediksi;
- c) yang tidak tentu terjadinya;
- d) yang tidak terhindarkan;
- e) yang tidak dapat dikendalikan.

Dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai “korban” dan layak “menerima bantuan” dari pihak luar.

2. Pandangan Ilmu Pengetahuan Alam

Bencana merupakan unsur lingkungan fisik alam yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadinya luar biasa, tidak seperti biasanya (normal). Bencana merupakan

proses geofisika, geologi dan hidrometeorologi, yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah, tidak menganggap manusia sebagai penyebab bencana. Pandangan ini mengajak untuk memahami sifat dan watak alam serta proses dinamikanya, agar kita bisa mengantisipasinya.

3. Pandangan Ilmu Terapan

Pandangan ini melihat bencana berdasarkan pada besarnya kekuatan atau daya rusaknya, serta tingkat kerusakan fisik yang diakibatkan oleh bencana. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan, konstruksi dan fisika. Pandangan ini lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan atau menahan daya rusak. Pandangan ini menghasilkan upaya pencegahan dan mitigasi yang bersifat struktural (*structural mitigation*).

4. Pandangan Progresif

Pandangan ini menganggap bahwa bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses kehidupan atau pembangunan. Bencana sebagai suatu masalah yang harus diperhitungkan dalam perjalanan kehidupan dan pembangunan. Pandangan ini mengarahkan perlunya kesadaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk selalu memperhitungkan adanya bencana dalam pembangunan.

5. Pandangan Ilmu Sosial

Pandangan ini memfokuskan pada sisi manusianya, baik secara individual maupun kelompok, bagaimana sikap dan perilaku manusia dan masyarakat menghadapi bencana. Pada dasarnya bencana itu adalah masalah sosial, karena jika bahaya atau fenomena alam yang terjadi tidak menimpa kehidupan manusia, tidaklah menjadi suatu bencana. Besarnya bencana yang dialami tergantung pada tingkat kerentanan individu atau masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana.

6. Pandangan Holistik

Pandangan ini memfokuskan pada ancaman bahaya, kerentanan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko bencana. Ancaman bahaya berupa gejala atau fenomena alam, sedangkan kerentanan dan kemampuan adalah kondisi sosial masyarakat dalam menghadapi bahaya. Ancaman bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Risiko bencana dapat berubah menjadi bencana, jika ada pemicu kejadian.

D. Stakeholder Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga urusan bersama masyarakat dan lembaga usaha. Dana Pemerintah terbatas vs bencana yang datang tidak mengenal waktu Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga diberdayakan untuk kegiatan mitigasi bencana. Dalam hal ini,

kemitraan dan sinergitas perlu dilaksanakan dalam identifikasi risiko, perencanaan, pelaksanaan pencegahan-mitigasi, penanganan saat terjadi bencana, dan pemulihan pasca bencana.

E. Tantangan Umum Dalam Penanggulangan Bencana

1. Pra Bencana : rendahnya kesadaran masyarakat dan para pihak dalam pemahaman manajemen risiko bencana → kenali-hindari-kurangi-antisipasi.
2. Saat Bencana : optimalisasi kesiapan sarpras dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam manajemen kedaruratan → *safe more lives and livelihood*.
3. Pasca Bencana : keterbatasan sumber daya pemulihan → *build back better and safer*.



F. Gangguan Umum Saat Bencana

1. Banyak korban terdampak langsung dan tidak langsung;
2. Terputusnya: jaringan listrik, air bersih, komunikasi, BBM;
3. Sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: makanan, minuman, pakaian bersih, obat-obatan, tempat perlindungan layak;
4. Terbatasnya sarpras, seperti: MCK, sarana pendidikan, sarana informasi dan hiburan;
5. Trauma;
6. Konflik antar masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait;
7. Kesulitan transportasi; dan banyak hal lain lagi.



LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI BIMBINGAN DAN SUPERVISI PRAKTIKUM LABORATORIUM

No.	Hari/Tanggal	Materi	Dokumentasi
1.	Kamis, 26 Januari 2023	Pertemuan awal tentang pelaksanaan praktikum dan penugasan matriks rencana kerja	
2.	Rabu, 1 Februari 2023	Pembahasan matriks rencana kerja; penjelasan pendekatan awal, asesmen dan penyusunan rencana intervensi	

3.	Rabu, 8 Februari 2023	Penerimaan di Kelurahan Kebon Jayanti serta pengarahan bagaimana pelaksanaan praktikum laboratorium dilakukan	
4.	Selasa, 13 Februari 2023	Pembahasan isu dan laporan praktikum	 <p data-bbox="1480 1166 1688 1217">Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia</p> <p data-bbox="1480 1217 1765 1294">Jalan Dago Pojok I, Coblong, Kota Bandung, 40135, Jawa Barat, Indonesia Lat -6.872622, Long 107.619074 02/13/2023 03:19 PM GMT+07.00 Note : Captured by GPS Map Camera</p>

5.	Kamis, 2 Maret 2023	Supervisi dan pembahasan isu serta laporan praktikum	 <p>Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia Jl. Stasiun Kiaracondong, Kiaracondong, Kota Bandung, 40281, Jawa Barat, Indonesia Lat -6.925062, Long 107.645633 03/02/2023 01:20 PM GMT+07.00 Note : Captured by GPS Map Camera</p>
6.	Selasa, 7 Maret 2023	Pembahasan isu dan laporan praktikum	 <p>Zoom Meeting</p> <p>Putra Endri</p>

7.	Rabu, 15 Maret 2023	Pembahasan isu dan laporan praktikum	
8.	Rabu, 5 & 6 April 2023	Pembahasan isu dan laporan praktikum	-
9..	Jumat, 14 April 2023	Bimbingan dan finalisasi laporan praktikum	

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI KEGIATAN PRAKTIKUM LABORATORIUM



Jumat, 27 Januari 2023
Penjajakan Pertama



Jumat, 3 Februari 2023
Pertemuan dengan PLT Kelurahan



Jumat, 3 Februari 2023
Transect Walk



Rabu, 8 Februari 2023
Penerimaan Mahasiswa Praktikum



Rabu, 8 Februari 2023
Berkunjung Ke Posyandu RW 11



Rabu, 8 Februari 2023
Anjongsana Ke Rumah Ketua RW



Kamis, 9 Februari 2023
Diskusi Persiapan Pertemuan TP-PKK



Jumat, 10 Februari 2023
Pertemuan Dengan TP-PKK



10 Februari 2023 Kel. Kebon Jayanti

**Jumat, 10 Februari 2023
Kegiatan Posbindu**



11 Februari 2023 - Kel. Kebon Jayanti

**Sabtu, 11 Februari 2023
Diskusi Kelompok**



Rabu, 15 Februari 2023 - Kelurahan Kebon Jayanti

**Rabu, 15 Februari 2023
Wawancara Dengan Kader
BPJS Kesehatan**



16 Februari - Kel. Kebon Jayanti

**Kamis, 16 Februari 2023
Kunjungan Ke Industri
Rumah Tangga**



**Jumat, 17 Februari 2023
Sosialisasi HIV/AIDS Oleh KPA**



**Jumat, 24 Februari 2023
Wawancara Dengan
Pendamping PKH**



1 Maret 2023 - Kel. Kebon Jayanti

**Rabu, 1 Maret 2023
Wawancara Dengan Puskesmas**



**Kamis, 2 Maret 2023
Kegiatan P2K2**



Kamis, 9 Maret 2023
Kegiatan Posyandu RW 2



Jumat, 10 Maret 2023
Kegiatan Posbindu & Sosialisasi
Puspel PP



Rabu, 15 Maret 2023
Pertemuan Rutin TP-PKK



Kamis, 16 Maret 2023
Pawai Obor Menyambut Ramadhan



Senin, 20 Maret 2023
Kegiatan Kelurahan
Menyambut Ramadhan



Kamis, 6 April 2023
Wawancara Dengan PLT Kelurahan



Rabu, 12 April 2023
Penyerahan Undangan Lokakarya



Jumat, 14 April 2023
Lokakarya Praktikum Laboratorium

NOUR MALITA AZAHRA RAMADHANY
NRP. 20.03.034

LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM PROGRAM STUDI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL



2023